

**LAPORAN KINERJA
(LKj)**

TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan. A. Syairani Pelaihari

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tersebut merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Rencana Strategi (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja selalu diharapkan saran dan kritik yang membangun, serta partisipasi dari semua pihak dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023, disampaikan terimakasih

Pelaihari, 19 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) adalah upaya pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Pasal 18 PERPRES tersebut, menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Selain itu, pelaksanaannya telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja tahun 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyajikan beberapa hal mengenai indikator pencapaian, baik melalui pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran pencapaian sasaran. Indikator sasaran tersebut telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja - Perubahan Tahun 2023, pada dasarnya telah terakomodir dalam indikator tahun 2023.

Pada tahun 2023, Realisasi Proses Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di angka 99,71%, sedangkan Realisasi Anggaran sebesar 84,56%.

Untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan ada kesungguhan, keseriusan, dan komitmen yang kuat, serta kerja sama dari semua pihak terkait untuk saling mengisi maupun memberikan saran atau masukannya kepada seluruh jajaran PNS di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Pelaihari, 19 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI SMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Cascading Kinerja	2
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	4
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	5
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	8
I. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Visi RPJMD	11
B. Misi RJMD.....	11
C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	19
1. Sasaran RPJMD.....	19
2. Eselon II	20
3. Eselon III	31
4. Eselon IV	53
B. Akuntabilitas Keuangan	64
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023	64
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	65
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	67

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Strategi Peningkatan Kinerja.....	69

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Perjanjian Kinerja 2023
- 4. Cascading / Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulanan (I – IV)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Laut salah satu satuan kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dimana strukturnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, BAPENDA Kabupaten Tanah Laut berwenang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 18 menyebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pelaksanaannya juga telah diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014.

Berakhirnya tahun 2023 menunjukkan BAPENDA Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan pelaksanaan program/kegiatan selama satu tahun anggaran. Atas hasil kerja dan capaian kinerja dalam satu tahun ini disusun dalam Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun Anggaran 2023 sebagai bentuk pelaporan penyampaian kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja SKPD.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Bapenda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dibuat dengan maksud memaparkan hasil kinerja Bapenda selama tahun anggaran 2023, dari Kepala Badan (Eselon II), Eselon III, dan Eselon IV). Sedangkan, tujuan dibuatnya Laporan Kinerja ini yaitu :

1. Melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Melaksanakan Evaluasi SAKIP 2023

C. Dasar Hukum

LKj BAPENDA Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 disusun berdasarkan atas :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

D. Cascading Kinerja

Cascading (Penjabaran) Kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (*casuality*), serta memiliki keterkaitan sinergitas (*aligment*).

Cascading Kinerja dimulai dengan Tujuan RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang dilanjutkan dengan Sasaran RPJMD. Sasaran RPJMD ini menjadi Tujuan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), lalu dilanjutkan dengan Sasaran OPD yang akan menjadi

tanggung jawab Eselon II. Selanjutnya Program yang dijalankan oleh OPD memiliki Sasaran Program yang akan menjadi tanggung jawab Eselon III. Dibawah Program ada Kegiatan dan dibawahnya lagi ada Sub Kegiatan. Sub Kegiatan yang sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 ini akan menjadi Kinerja Eselon IV. *Cascading* Badan Pendapatan Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang bidang pendapatan. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut menurut Pasal 30 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022, yaitu

1. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah.

5. Bidang Pendapatan Lain – Lain, Retribusi Daerah dan Pelaporan, terdiri atas;
 - a. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan; dan
 - b. Sub Bidang Retribusi Daerah;
6. UPTD Badan; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Proses Bisnis Bapenda sebagaimana Tugas dan Fungsinya yakni menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-undang ini berlandaskan pada 4 pilar utama, yakni :

1. Mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien,
2. Mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horinzontal melalui TKD (Transfer ke Daerah) dan Pembiayaan Utang Daerah
3. Mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah
4. Harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan kesinambungan fiskal

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Otonomi Daerah diharapkan secara perlahan mampu untuk membiayai sendiri kegiatan Pemerintah Daerah, sehingga secara perlahan bantuan dari Pemerintah Pusat dapat berkurang sehingga Kemandirian Fiskal dapat terwujud. Tingkat Kemandirian Fiskal ini diperoleh dari Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun berjalan dibagi Realisasi Pendapatan Daerah tahun Berjalan. Kemandirian Fiskal dalam kategori Menuju Mandiri ($25\% < - < 50\%$) harus didukung dengan Pertumbuhan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Sumber PAD ada 4, yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Tingkat Kemandirian Fiskal Kabupaten Tanah Laut dalam 5 Tahun terakhir masih pada kisaran 8-9% atau masih dalam kategori Belum Mandiri. Bapenda dalam meningkatkan PAD, bekerja secara langsung pada sumber Pajak Daerah, sedangkan pada 3 Sumber lainnya hanya bisa melakukan koordinasi dengan SKPD dan BLUD yang

memiliki tugas pada 3 Sumber PAD tersebut, sehingga untuk meningkatkan kemandirian fiskal perlu didukung SKPD dan BLUD lainnya.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran

Sumber daya manusia / susunan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan jabatan struktural, fungsional dan PTT berjumlah 41 orang terdiri dari 28 orang PNS dan 14 orang PTT yang secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkat Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan	1	Pimpinan
2.	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Pejabat Pengawas
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	Pejabat Pengawas
5.	Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan	1	Pejabat Administrator
6.	Kasubbid Penagihan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
7.	Kasubbid Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
8.	Kabid Pengelolaan Pajak Daerah	1	Pejabat Administrator
9.	Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
10.	Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah	1	Pejabat Pengawas
11.	Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda dan Pelaporan	1	Pejabat Administrator
12.	Kasubbid Retda	1	Pejabat Pengawas
13.	Kasubbid Pendapatn Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan	1	Pejabat Pengawas

Tabel 1.2
Susunan PNS berdasarkan Kepangkatan dan Pendidikan

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
1	2	3	4
1.	IV/c	S-2	1
2.	IV/b	S-2	1
3.	IV/a	S-2	1
4.	IV/a	S-1	1
5.	III/d	S-1	5
6.	III/c	S-2	1
7.	III/c	S-1	4
8.	III/c	D-3	1
9.	III/b	S-2	1
10.	III/b	S-1	2
11.	III/a	S-1	3

No.	Pangkat/Golongan	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Org)
12.	III/a	D-3	2
13.	II/d	D-3	1
14.	II/d	SLTA	2
15.	I/d	SLTP	1
Total			28

Tabel 1.3
 Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Pelaksana, Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), dan Non PNS

No.	-Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pranata Komputer Muda	1	JFT
2.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	3	JFT
3.	Bendahara Pengeluaran	1	Pelaksana
4.	Pengelola Keuangan	-	Pelaksana
5.	Verifikator Keuangan	-	Pelaksana
6.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1	Pelaksana
7.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana
8.	Analisis Pajak dan Retribusi Daerah	3	Pelaksana
9.	Pengelola Penagihan dan Pengawasan	1	Pelaksana
10.	Pengelola Pendapatan	1	Pelaksana
11.	Pengadministrasi Umum	2	Pelaksana
12.	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi	1	Pelaksana
13.	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	14	Non PNS
Total		29	

Pada APBD Murni 2023, Bapenda memiliki Anggaran Belanja sebesar Rp. 12.033.824.888,- yang terdiri dari Rp. 9.761.346.136,- pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Rp. 2.272.478.752,- pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Anggaran Pendapatan ditargetkan sebesar Rp. 49.251.000.000,-.

Pada APBD Perubahan 2023, Anggaran Belanja meningkat sebesar Rp. 1.175.577.482,- menjadi Rp. 13.209.402.370,- dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota meningkat Rp. 1.255.268.238,- dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah menurun Rp. 79.690.756,-. Anggaran Pendapatan pun meningkat Rp. 166.625.000,- menjadi Rp. 49.417.625.000,-

Sarana dan Prasarana di Badan Pendapatan Daerah untuk menunjang proses bisnisnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4

Jumlah Sarana dan Prasarana per 31 Desember 2023

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
A	Komputer	90	965.415.231,31
1.	P.C Unit	29	249.413.868,50
2.	Lap Top	5	63.997.140
3.	Note Book	2	31.648.333,33
4.	Hard Disk	1	9.900.000
5.	Monitor	5	7.675.000
6.	Printer	33	393.129.889,48
7.	Scanner	5	48.105.000
8.	External/ Portable Hardisk	1	1.320.000
9.	Server	3	147.000.000
10.	Router	2	6.930.000
11.	Hub	1	2.816.000
12.	Wireless Access Point	3	3.480.000
B	Alat Angkutan	16	347.813.741,18
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke bawah)	1	156.850,000
	Sepeda Motor	15	190.963.741,18
C	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	4	21.394.444,44
	Mesin Gerinda	1	950.000
	Peralatan ukur, gip dan feeting lainnya (dst)	1	4.975.000
	Global Positioning System	1	14.519.444,44
	Termometer Standar	1	950.000
D	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	150	271.168.076,08
	Lemari Besi/Metal	9	24.588.000
	Lemari Kayu	2	1.881.000
	Rak Besi	19	44.001.000
	Filing Cabinet Besi	15	33.100.000
	Locker	2	4.100.000
	Lemari Kaca	3	4.350.000
	Alat Kantor Lainnya	1	1.408.000
	Meja Kerja Kayu	62	40.872.592,75
	Kursi Besi/Metal	4	5.430.000
	Meja Rapat	1	11.172.000
	Kursi Rapat	5	2.748.250
	Kursi Tamu	2	7.702.800
	Kursi Biasa	1	3.200.000
	Bangku Tunggu	4	7.987.000
	Sofa	1	7.425.000
	Lemari Es	1	1.900.000
	A.C. Split	13	64.132.433,33
	Kipas Angin	3	1.500.000
	Treng Air/Tandon Air	1	1.705.000
	Tangga Aluminium	1	1.965.000

No.	Nama Barang	Volume	Satuan
E	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	3	159.384.000
	Layar Film/Projector	1	6.300.000
	Mesin Pelubang (Peralatan Cetak)	2	96.950.000
	Genset		56.134.000
F	Alat Laboratorium	9	55.825.000
	Uninterrupted Power Supply (UPS)	9	55.825.000

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 Nomor 700.1.2.1/173/LHE-AKIP/Insp/2023 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut menunjukkan perolehan Nilai SAKIP Bapenda pada angka 79,25 dengan kategori Sangat Baik (BB). Ada 4 Komponen yang dinilai pada Evaluasi AKIP, dan Bapenda mendapatkan saran yang harus ditindaklanjuti untuk memperbaiki nilai SAKIP untuk tahun 2023 ini. Adapun saran dari Hasil Evaluasi SAKIP 2022 yang sudah ditindak lanjuti oleh Bapenda pada tahun 2023 ini yaitu :

Tabel 1.5
Tabel Matriks Tindaklanjut LHE SAKIP 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
A.	Perencanaan Kinerja	
1.	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan, bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	IKU Eselon II dan IKP Eselon III dari Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja sudah dipertahankan keselarasannya. Begitu juga dengan Kinerja Eselon IV sudah dipertahankan keselarasannya sesuai Sub Kegiatan di Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
B.	Pengukuran Kinerja	
1.	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar	Sudah dilakukan monitoring secara berkala dan berjenjang untuk memantau perkembangan perncapaian target kinerja dengan mengisi lembar evaluasi dan monitoring, dari Eselon II, III, dan IV.
2.	Perlunya pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati.	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Kasubbid Pendapatan Lain-Lain, dan Perencanaan Pendapatan, Tenaga Ahli Pemrograman di bawah Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dan Staf di bawah Sub Bagian Perencanaan, dipercaya untuk mengumpulkan data
2.	Agar dalam laporan kinerja menginformasikan perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Disetiap Indikator Eselon II, III, dan IV disampaikan 1 paragraf rencana perbaikan di tahun 2024
3.	Agar dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.	Laporan kinerja direviu masing-masing Eselon
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi, hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja.	Laporan kinerja direviu masing-masing Eselon
2.	Agar rekomendasi hasil Evaluasi APIP ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja	Semua rekomendasi dari APIP sudah diusahakan untuk ditindaklanjuti

I. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian
- BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
 - A. Visi RPJMD
 - B. Misi RPJMD
 - C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 - D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
 - E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 - 1. Sasaran RPJMD
 - 2. Eselon II
 - 3. Eselon III
 - 4. Eselon IV
 - B. Akuntabilitas Keuangan
 - 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
 - 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 - 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022
- BAB IV PENUTUP
 - A. Simpulan
 - B. Strategi Peningkatan Kinerja

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Visi RPJMD

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, yaitu

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi”

Dalam visi itu terkandung makna sebagai berikut :

1. **Berkarya** : Makna kata “berkarya” lebih tinggi dari pada “bekerja” ; yaitu merujuk pada hasil kerja, yaitu: secara bersama-sama, berkarya mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
2. **Inovasi** : Adalah solusi logis terhadap kelangkaan. Inovasi adalah terobosan cara kerja, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan / adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. **Tertata** : Bermakna tertib administrasi dan tertib substansi, yaitu pemerintahan yang tertata dan terkelola dengan baik (*Good Governance*).
4. **Relegius** : Aktualisasi nilai dan prinsip keagamaan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat.
5. **Aktual** : Pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani.
6. **Sinergi** : Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

B. Misi RPJMD

Sebagaimana Visi RPJMD Kabupaten Tanah Laut, agar dapat diwujudkan harus diperinci ke dalam Misi. Berdasarkan Visi RPJMD tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam 5 Misi, sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat,
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterkaitan Misi RPJMD 2018-2023 Kabupaten Tanah Laut dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut ada pada Misi ke-3 (tiga), yaitu : **Membangun tata kelola pemerintahan yang baik.**

C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut secara eksplisit (gamblang) tidak disebutkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Namun, apabila dianalisa, maka secara implisit Tujuan Bapenda berkaitan dengan Sasaran RPJMD “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik” yang tertera pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 Halaman 397, dengan indikator yang tertera pada halaman 708.

Sasaran RPJMD “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik” ini kemudian dirumuskan menjadi 3 Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 3 Tujuan dan Indikatornya, yaitu;

Tabel 2.1
Tujuan Badan Pendapatan Daerah

No	Tujuan Bapenda	Indikator
1.	Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat
		Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat
		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat
2.	Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah	Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat
		Persentase penerimaan pajak daerah meningkat
		Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat
3.	Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien	Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai

Adapun Sasaran beserta Indikator yang menjadi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang tercantum di Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu

- **Sasaran Strategis (IKU Badan Pendapatan Daerah)**
 - 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi**

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKU) yang mana IKU ini diemban oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut, yaitu:

Tabel 2.2
Tabel IKU Badan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KUNCI	CARA HITUNG
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$
	2. Persentase Pertumbuhan PAD	$\frac{\text{Realisasi PAD tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100\%$
	3. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (n)}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah tahun berjalan (n)}} \times 100\%$

- **Sasaran Program**
 - 2. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid;**

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.3
Tabel Sasaran Program ke-1 Kabid Pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	$(\text{Data Wajib Pajak tidak valid tahun berjalan} \div \text{Data Wajib Pajak tahun berjalan}) \times 100$

3. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tabel Sasaran Program ke-2 Kabid Pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Apakah 11 Jenis Pajak Terealisasi ? $Ya = 100 \%$ $Tidak = (Jumlah\ Jenis\ Pajak\ Terealisasi \div 11) \times 100$

4. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tabel Sasaran Program ke-3 Kabid Pengelolaan Pajak Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	$(Realisasi\ Ketetapan\ tahun\ berjalan \div Target\ Ketetapan\ tahun\ berjalan) \times 100$

5. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.6
Tabel Sasaran Program ke-1 Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	$(Realisasi\ Rupiah\ PBB-P2\ dan\ BPHTB\ tahun\ berjalan \div Target\ Rupiah\ PBB-P2\ dan\ BPHTB\ tahun\ berjalan) \times 100$

6. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB);

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.7
Tabel Sasaran Program ke-2 Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	$\frac{\text{(Realisasi Rupiah Pajak Daerah (non PBB-P2 \& BPHTB) tahun berjalan)}}{\text{Target Rupiah Pajak Daerah (non PBB-P2 \& BPHTB) tahun berjalan}} \times 100$

7. Menurunnya tunggakan PBB-P2;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.8
Tabel Sasaran Program ke-3 Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	$\frac{\text{(Realisasi tunggakan PBB-P2 tertagih tahun berjalan)}}{\text{Target tunggakan PBB-P2 tertagih tahun berjalan}} \times 100$

8. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan (PRP) (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.9
Tabel Sasaran Program ke-1 Kabid PRP

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	$\frac{\text{(Realisasi PLL \& Retribusi Daerah tahun berjalan (n) - Realisasi PLL \& Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1))}}{\text{Realisasi PLL \& Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$

9. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.10
Tabel Sasaran Program ke-2 Kabid PRP

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	$\frac{(\text{Realisasi PLL tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi PLL tahun sebelumnya (n-1)})}{\text{Realisasi PLL tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$
	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	$\frac{(\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun berjalan (n)} - \text{Realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1)})}{\text{Realisasi Retribusi Daerah tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$

10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah

Sasaran Program ini diemban oleh Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan (Eselon III), indikatornya sebagai berikut :

Tabel 2.11
Tabel Sasaran Program Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Hitung
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Pengolahan dan Analisis Data
	Nilai Hasil Evaluasi RB	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi ZI	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Hasil Evaluasi dari Inspektorat
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	$\frac{(\text{Jumlah temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan)}} \times 100$

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 berdasarkan Renja Perubahan 2023 serta Sub Kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) Perubahan Tahun 2023, dimana telah tergambar target kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran. Sasaran Strategis/SKPD/OPD menjadi Kinerja Utama Eselon II, Sasaran Program menjadi Kinerja Utama Eselon III, dan Kinerja Utama Eselon IV berdasarkan Kinerja dari Sub Kegiatan yang diembannya sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021. Adapun rincian Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	INDIKATOR KINERJA KUNCI		TARGET
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00%
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	3,50%
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,77%

Tabel 2.13
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6,5%
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%

Tabel 2.14
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%
Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%
Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,0%

Tabel 2.15
Tabel Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1,85%
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1,90%
	Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,76%

Tabel 2.16
Tabel Perjanjian Kinerja Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 (B)
	Nilai Hasil Evaluasi RB	-
	Nilai Hasil Evaluasi ZI	78 (BB)
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)
	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%

E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Untuk mendukung Capaian Kinerja, Badan Pendapatan Daerah membuat kebijakan untuk memberikan *reward* kepada wajib pajak hotel dan restoran, serta juga *reward* kepala pelanggan hotel dan restoran dengan menggunakan metode undian. Selain itu, Badan Pendapatan Daerah mengandalkan aplikasi SIMDA Pendapatan dan SIM PBB, serta memaksimalkan SIPD dalam proses bisnisnya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Sasaran RPJMD

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut secara eksplisit (gamblang) tidak disebutkan dalam Sasaran RPJMD Kabupaten Tanah Laut. Namun, apabila dianalisa, maka secara implisit Tujuan Bapenda berkaitan dengan Sasaran RPJMD **“Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik”** yang tertera pada Dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 Halaman 397, dengan indikator yang tertera pada halaman 708. Kemudian Sasaran RPJMD tadi dirumuskan menjadi 3 Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut. 3 Tujuan dan Indikatornya, yaitu;

- 1. Meningkatkan penggalian potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;**
- 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah;**
- 3. Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien.**

Adapun Sasaran Bapenda Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang tercantum di Renstra Bapenda Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu

- **Sasaran Strategis**

- 1. Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi**

- **Sasaran Program**

- 2. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid;**
- 3. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah;**
- 4. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah;**
- 5. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB;**
- 6. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB);**
- 7. Menurunnya tunggakan PBB-P2;**
- 8. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 9. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah;**
- 10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah**

2. Eselon II

Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menjadi Kinerja Utama Kepala Badan (Eselon II) memiliki 3 Indikator Kinerja Utama dan 3 Target dari 1 Kinerja Utama. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Badan memiliki 28 orang ASN dan 14 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 13.209.402.370, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 11.169.377.775 (84,56%). Dasar perhitungan Indikator ini masih menggunakan LRA Kabupaten Tanah Laut 2023 dan LRA Kabupaten Hulu Sungai Utara yang belum diaudit. Berikut ini realisasi dari target Kepala Badan (Eselon II) pada Tahun 2023 :

Tabel 3.1
Tabel Target dan Realisasi IKU

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Target %	Realisasi %	Capaian %
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00	15,27	191,00
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	3,50	3,85	110,00
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,77	9,13	104,10

Tabel 3.2
Tabel Perbandingan Realisasi IKU Kab. Tanah Laut dengan Kab. Hulu Sungai Utara (HSU)

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Realisasi Kab. Tanah Laut %	Realisasi Kab. HSU %
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	15,27	-4,54
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	3,85	25,65
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	9,13	10,52

Indikator 1 : Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Perhitungan Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

Realisasi Pajak Daerah 2023	:	Rp.	52.648.545.663,68
Realisasi Retribusi Daerah 2023	:	<u>Rp.</u>	<u>7.676.400.350,00</u> +
Total	:	Rp.	60.324.946.013,68
Realisasi Pajak Daerah 2022	:	Rp.	45.363.440.225,80
Realisasi Retribusi Daerah 2022	:	<u>Rp.</u>	<u>6.971.598.007,00</u> +
Total	:	Rp.	52.335.038.232,80

Realisasi 2023 = $\frac{(60.324.946.013,68 - 52.335.038.232,80)}{52.335.038.232,80} \times 100$
= 15,27%

Tabel 3.3
Capaian Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	8,00	-5,21	-65,09	8,00	5,98	74,25	8,00	15,27	234,87
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										234,87

Tabel 3.4
Capaian Pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	%	8,00	15,27	234,87	8,00	190,84

Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 sukses meningkat sebesar 15,27% dari tahun 2022. Realisasi tahun 2023 di atas target Renja Perubahan 2023 sebesar 8,00%. Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2023 terhadap target APBP-P 2023 sebesar 104,36%. Realisasi Pajak Daerah di atas target APBP-P, yakni 106,79%, sedangkan Realisasi Retribusi Daerah 90,24%. Adapun terhadap target akhir Renstra 2018-2023, Realisasi indikator tahun ini di atas target 8,00%.

Meningkatnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebabkan Meningkatnya Retribusi Daerah dibanding tahun 2022 sebesar 10,11%, serta Meningkatnya Pajak Daerah dibanding tahun 2022 sebesar 16,06%. Adapun rincian kenaikan Pajak Daerah, yaitu:

Tabel 3.5
Realisasi Peningkatan Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah

No	Pajak Daerah	Realisasi Peningkatan
1.	Hotel	-16,84%
2.	Restoran	40,22%
3.	Hiburan	33,98%
4.	Reklame	-17,46%
5.	Penerangan Jalan	4,73%
6.	Parkir	82,41%
7.	Air Tanah	8,55%
8.	Sarang Burung Walet	4,71%
9.	Mineral Bukan Logam dan Batuan	66,15%
10.	PBB-P2	10,52%
11.	BPHTB	37,61%
No	Retribusi Daerah	Realisasi Peningkatan
1.	Retribusi Jasa Umum	-3,68%
2.	Retribusi Jasa Usaha	17,99%
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	26,59%

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu :

- 1) SPPT PBB-P2 tahun 2023 baru ditetapkan pada bulan Mei 2023, sehingga penagihan penagihan PBB-P2 baru bisa dimulai setelahnya.
- 2) Belum adanya metode pengawasan pembayaran PBB-P2 per desa secara *realtime* berbasis teknologi informasi
- 3) Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu
- 4) Banyaknya data subjek pajak PBB-P2 yang tidak valid.
- 5) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan perpajakannya secara rutin.
- 6) Masih kurangnya petugas penagihan dan pengawasan Pajak Daerah
- 7) SKPD masih belum memahami tentang transaksi non tunai (ETPD) dari segi pendapatan dan merasa kesulitan menerapkan di masyarakat
- 8) Bank Kalsel sebagai bank rujukan RKUD belum menyiapkan / belum memenuhi permintaan untuk menyediakan QRIS bagi Bendahara Penerima dan IBB

- 9) SKPD Pengelola Retribusi terlalu tinggi dalam memasang target pendapatan, tidak memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga terkesan target retribusi tidak tercapai.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun 2023, yaitu :

- 1) Pemberian *reward* kepada wajib pajak Restoran dan Hotel, dan pelanggan dari Restoran dan Hotel yang membayar pajak.
- 2) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui aplikasi SIM PBB
- 3) Menyampaikan surat tagihan kepada Subjek PBB-P2 yang berdomisili diluar Kabupaten Tanah Laut
- 4) Mendatangi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan
- 5) Menghubungi Wajib Pajak via Telepon untuk melakukan penagihan
- 6) Melakukan pengawasan kepada Koordinator Kecamatan dan Kolektor PBB-P2 Kelurahan/Desa dalam menyampaikan SPPT PBB-P2
- 7) Secara aktif mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban pajak daerah per bulan
- 8) Turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah,
- 9) Upgrade alat perekam data transaksi pembayaran pajak secara online sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk wajib pajak hotel dan restoran
- 10) Melaksanakan monev terhadap target dan pendapatan retribusi SKPD
- 11) Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat ke SKPD untuk segera melaksanakan Transaksi Non Tunai / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- 12) Menyurati Bank Kalsel agar memfasilitasi penyediaan QRIS dan EDC

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk perbaikan kinerja, yaitu :

- 1) Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
- 2) Membuat metode pengawasan pembayaran PBB-P2 secara realtime melalui Aplikasi Smartgov
- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.

- 4) Mengingatnkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah
- 6) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui database PBB-P2
- 7) Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
- 8) Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan/Perusahaan.
- 9) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah
- 10) Menghimbau pada wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku
- 11) Mensosialisasikan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
- 12) Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukseskan Transaksi Non Tunai
- 13) Memantau perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 14) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 15) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 16) Mengarahkan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang satu Provinsi dengan Kabupaten Tanah Laut, secara persentase Kab. Tanah Laut lebih baik dari Kab. HSU. Pajak dan Retribusi Daerah Kab. HSU menurun daripada tahun 2022, walaupun Pajak Daerahnya naik 2,40% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan Indikator ini dikarenakan Retribusi Daerah yang menurun 18,49% dibanding 2022.

Tabel 3.6
Tabel Perbandingan Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Tanah Laut dengan Kab. Hulu Sungai Utara

Tahun	Realisasi PD&RD Kab. Tanah Laut (Rp)	Realisasi PD&RD Kab. HSU (Rp)	Realisasi Pertumbuhan PD&RD Kab. Tala %	Realisasi Pertumbuhan PD&RD Kab HSU %
2022	52.335.038.232,80	18.821.074.244,00	5,98	-
2023	60.324.946.013,68	17.966.012.690,00	15,27	-4,54

Indikator 2 : Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Perhitungan Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

Realisasi PAD 2023 : Rp 201.345.307.158,18

Realisasi PAD 2022 : Rp 193.890.015.753,87

Realisasi 2023 = $\frac{(201.345.307.158,18 - 193.890.015.753,87)}{193.890.015.753,87} \times 100$

= 3,85%

Tabel 3.7
Capaian Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	4,86	8,70	179,01	4,12	-5,94	-144,19	3,50	3,85	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										

Tabel 3.8
Capaian Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	%	3,50	3,85	110,00	6,20	62,02

Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023 meningkat sebesar 3,85% dari Tahun 2022, dimana ini di atas target Renja Perubahan 2023. Realisasi PAD tahun 2023 terhadap target APBD-P tahun 2023 sebesar 93,30%. Realisasi tahun 2023 ini masih dibawah target akhir Renstra 2018-2023 sebesar 6,20%. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2023 ini disebabkan meningkatnya 3 Sumber PAD daripada tahun 2022, yakni Pajak Daerah 16,06%, Retribusi Daerah 10,11%, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 9,04%. Hanya pada sumber Lain-lain PAD yang Sah menurun 1,17%

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

- 1) SPPT PBB-P2 tahun 2023 baru ditetapkan pada bulan Mei 2023, sehingga penagihan penagihan PBB-P2 baru bisa dimulai setelahnya.
- 2) Belum adanya metode pengawasan pembayaran PBB-P2 per desa secara *realtime* berbasis teknologi informasi
- 3) Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu

- 4) Banyaknya data subjek pajak PBB-P2 yang tidak valid.
- 5) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan perpajakannya secara rutin.
- 6) Masih kurangnya petugas penagihan dan pengawasan Pajak Daerah
- 7) SKPD masih belum memahami tentang transaksi non tunai (ETPD) dari segi pendapatan dan merasa kesulitan menerapkan di masyarakat
- 8) Bank Kalsel sebagai bank rujukan RKUD belum menyiapkan / belum memenuhi permintaan untuk menyediakan QRIS bagi Bendahara Penerima dan IBB
- 9) SKPD Pengelola Retribusi terlalu tinggi dalam memasang target pendapatan, tidak memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga terkesan target retribusi tidak tercapai.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023, yaitu :

- 1) Pemberian *reward* kepada wajib pajak Restoran dan Hotel, dan pelanggan dari Restoran dan Hotel yang membayar pajak.
- 2) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui aplikasi SIM PBB
- 3) Menyampaikan surat tagihan kepada Subjek PBB-P2 yang berdomisili diluar Kabupaten Tanah Laut
- 4) Mendatangi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan
- 5) Menghubungi Wajib Pajak via Telepon untuk melakukan penagihan
- 6) Melakukan pengawasan kepada Koordinator Kecamatan dan Kolektor PBB-P2 Kelurahan/Desa dalam menyampaikan SPPT PBB-P2
- 7) Secara aktif mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban pajak daerah per bulan
- 8) Turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah,
- 9) Upgrade alat perekam data transaksi pembayaran pajak secara online sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk wajib pajak hotel dan restoran
- 10) Melaksanakan monev terhadap target dan pendapatan retribusi SKPD
- 11) Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat ke SKPD untuk segera melaksanakan Transaksi Non Tunai / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- 12) Menyurati Bank Kalsel agar memfasilitasi penyediaan QRIS dan EDC

Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk perbaikan kinerja, yaitu :

- 1) Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
- 2) Membuat metode pengawasan pembayaran PBB-P2 secara realtime melalui Aplikasi Smartgov
- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.
- 4) Mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
- 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah
- 6) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui database PBB-P2
- 7) Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
- 8) Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan/Perusahaan.
- 9) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah
- 10) Menghimbau pada wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku
- 11) Mensosialisasikan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
- 12) Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukseskan Transaksi Non Tunai
- 13) Memantau perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 14) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 15) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 16) Mengarahkan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan

Apabila dibandingkan dengan Kab. Hulu Sungai Utara, secara persentase, realisasi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar 25,65%, lebih tinggi dari Kab. Tanah Laut yang sebesar 3,85%. Persentase realisasi Pertumbuhan PAD Kab. Hulu Sungai Utara yang tinggi ini disebabkan meningkatnya Pajak Daerah 2,40%, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6,71%,, dan Lain-lain PAD yang Sah 34,54% . Namun jika dilihat secara keuangan, realisasi PAD Kab. Tanah Laut lebih tinggi dari Kab. Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.9
Tabel Perbandingan Realisasi PAD Kab. Tanah Laut dengan Kab. Hulu Sungai Utara

Tahun	Realisasi PAD Kab. Tanah Laut (Rp)	Realisasi PAD Kab. HSU (Rp)	Realisasi Pertumbuhan PAD Kab. Tala %	Realisasi Pertumbuhan PAD Kab HSU %
2022	193.890.015.753,87	125.386.713.912,32	-5,94	-
2023	201.345.307.158,18	143.653.949.974,62	3,85	25,65

Indikator 3 : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Perhitungan Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah sebagai berikut :

Realisasi PAD 2023 : Rp 201.345.307.158,18
Realisasi Pendapatan Daerah 2023 : Rp 2.205.493.594.173,45

$$\text{Realisasi 2023} = 201.345.307.158,18 / 2.205.493.594.173,45 \times 100$$
$$= 9,13 \%$$

Tabel 3.10
Capaian Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	8,66	13,54	156	8,63	8,98	104,05	8,77	9,13	104,10
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										114,12

Tabel 3.11
Capaian PAD Terhadap Pendapatan Daerah 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	8,77	9,13	104,10	8,77	104,10

Secara umum, Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (bisa disebut Tingkat Kemandirian Fiskal) dalam target Renstra 2018-2023 masih pada kategori “Rendah Sekali” karena masih dibawah 25%. Tingkat Kemandirian Fiskal pada tahun 2023 berhasil pada angka 9,13%. Artinya, Pendapatan Asli Daerah dapat berkontribusi pada APBD sebesar 9,13%. Pencapaian ini berhasil di atas target Renja Perubahan 2023 sebesar 8,00% dan Renstra 2018-2023 sebesar 8,77%. Apabila Tingkat Kemandirian Fiskal

diharapkan 25% pada tahun 2023 ini, dengan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 2.003.859.813.167,27,- dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp. 288.473.848,-, maka Realisasi PAD harus sebesar Rp. 668.049.429.005,09,-.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, yaitu :

- 1) SPPT PBB-P2 tahun 2023 baru ditetapkan pada bulan Mei 2023, sehingga penagihan penagihan PBB-P2 baru bisa dimulai setelahnya.
- 2) Belum adanya metode pengawasan pembayaran PBB-P2 per desa secara *realtime* berbasis teknologi informasi
- 3) Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu
- 4) Banyaknya data subjek pajak PBB-P2 yang tidak valid.
- 5) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan perpajakannya secara rutin.
- 6) Masih kurangnya petugas penagihan dan pengawasan Pajak Daerah
- 7) SKPD masih belum memahami tentang transaksi non tunai (ETPD) dari segi pendapatan dan merasa kesulitan menerapkan di masyarakat
- 8) Bank Kalsel sebagai bank rujukan RKUD belum menyiapkan / belum memenuhi permintaan untuk menyediakan QRIS bagi Bendahara Penerima dan IBB
- 9) SKPD Pengelola Retribusi terlalu tinggi dalam memasang target pendapatan, tidak memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga terkesan target retribusi tidak tercapai.

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023, yaitu :

- 1) Pemberian *reward* kepada wajib pajak Restoran dan Hotel, dan pelanggan dari Restoran dan Hotel yang membayar pajak.
- 2) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui aplikasi SIM PBB
- 3) Menyampaikan surat tagihan kepada Subjek PBB-P2 yang berdomisili diluar Kabupaten Tanah Laut
- 4) Mendatangi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan
- 5) Menghubungi Wajib Pajak via Telepon untuk melakukan penagihan
- 6) Melakukan pengawasan kepada Koordinator Kecamatan dan Kolektor PBB-P2 Kelurahan/Desa dalam menyampaikan SPPT PBB-P2
- 7) Secara aktif mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban pajak daerah per bulan

- 8) Turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah,
 - 9) Upgrade alat perekam data transaksi pembayaran pajak secara online sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk wajib pajak hotel dan restoran
 - 10) Melaksanakan monev terhadap target dan pendapatan retribusi SKPD
 - 11) Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat ke SKPD untuk segera melaksanakan Transaksi Non Tunai / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
 - 12) Menyurati Bank Kalsel agar memfasilitasi penyediaan QRIS dan EDC
- Upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk perbaikan kinerja, yaitu :
- 1) Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
 - 2) Membuat metode pengawasan pembayaran PBB-P2 secara realtime melalui Aplikasi Smartgov
 - 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.
 - 4) Mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
 - 5) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah
 - 6) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui database PBB-P2
 - 7) Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
 - 8) Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan/Perusahaan.
 - 9) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah
 - 10) Menghimbau pada wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku
 - 11) Mensosialisasikan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
 - 12) Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukseskan Transaksi Non Tunai
 - 13) Memantau perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah

- 14) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 15) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- 16) Mengarahkan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan

Apabila dibandingkan dengan Kab. Hulu Sungai Utara, secara presentase, Kab. HSU mampu menunjukkan realisasi Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian Fiskal) tahun 2023 sebesar 10,52%, lebih tinggi dari Kab. Tanah Laut yang sebesar 9,13%. Tingginya Tingkat Kemandirian Fiskal Kab. HSU dikarenakan Realisasi PAD yang meningkat 25,65%. Sedangkan, Pendapatan Daerah hanya meningkat 1,41%, sehingga peningkatan PAD yang besar ini yang menyebabkan Tingkat Kemandirian Fiskalnya lebih tinggi dari Kab. Tanah Laut. Namun jika dilihat Realisasi PAD dan Pendapatan Daerah secara keuangan, Kabupaten Tanah Laut lebih tinggi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Tabel 3.12
Tabel Perbandingan Realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kab. Tanah Laut dengan Kab. Hulu Sungai Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi %
2023 Kab. Tala	201.345.307.158,18	2.205.493.594.173,45	9,13
2023 Kab. HSU	143.653.949.974,62	1.365.589.679.990,62	10,52

3. Eselon III

a. Sasaran Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (P3)

Ada 3 kinerja utama yang diemban Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan yang memiliki 3 Indikator Kinerja. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P3 memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), 4 Jabatan Fungsional Umum (JFU), 2 Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan anggaran Rp 967.090.294, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 694.881.675 (71,85%). Berikut ini, indikator kinerjanya, targetnya, serta realisasinya:

Tabel 3.13
Tabel Capaian Kinerja Kabid Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	104,86%	104,86%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%	107,56%	107,56%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,00%	6,00%	299,87%

Indikator 1 : Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

Penerimaan Pajak Daerah (yang dimaksud disini adalah PBB-P2 dan BPHTB sesuai Renstra 2018-2023) sebesar Rp 14.691.331.800,-, sedangkan targetnya Rp 14.010.000.000,-. Sehingga realisasinya sebesar 14.691.331.800 / 14.010.000.000 x 100 = **104,86%**.

Tabel 3.14
Capaian Persentase Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	%	100	109,62	109,62	100	123,25	123,25	100	104,86	104,86
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										104,86

Tabel 3.15
Capaian Persentase Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB 2023
Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	%	100	104,86	104,86	100	104,86

Capaian Persentase Kontribusi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB dari tahun 2020-2023 selalu diatas 100%. Hal ini dikarenakan realisasi PBB-P2 dan BPHTB selalu diatas target APBD-P baik 2020-2023. PPB-P2 dan BPHTB tahun 2023 meningkat 25,47% dibanding tahun 2022, dimana PBB-P2 meningkat 10,52% dan BPHTB meingkat 37,61%. Sehingga Capaian terhadap target akhir Renstra diperoleh 104,86%

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan pada tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini yaitu

- 1) Membentuk *Focus Grup Discussion* (FGD) di Grup WhatsApp yang beranggotakan petugas Bapenda, Kolektor PBB-P2 Kecamatan, dan Kolektor PBB-P2 Desa Kabupaten Tanah Laut
- 2) Melakukan pengawasan kepada Koordinator Kecamatan dan Kolektor PBB-P2 Kelurahan/Desa dalam menyampaikan SPPT PBB-P2
- 3) Melakukan pengecekan pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi SIM PBB.
- 4) Melakukan pengiriman surat tagihan PBB-P2 kepada pemilik Tanah dan Bangunan yang berada diluar Kabupaten Tanah Laut
- 5) Rutin mengikuti kegiatan Manunggal Kabupaten Tanah Laut bertemu masyarakat untuk mensosialisasikan mengenai PBB-P2 dan BPHTB.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu

- 1) SPPT PBB-P2 tahun 2023 baru ditetapkan pada bulan Mei 2023, sehingga penagihan penagihan PBB-P2 baru bisa dimulai setelahnya.
- 2) Pada Triwulan II, Kelurahan/Desa masih dalam tahap penyampaian SPPT PBB-P2 kepada Wajib Pajak.
- 3) Belum adanya metode pengawasan pembayaran PBB-P2 per desa secara *realtime* berbasis teknologi informasi
- 4) Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu
- 5) Banyaknya data subjek pajak PBB-P2 yang tidak valid.

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu:

- 1) Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
- 2) Membuat metode pengawasan pembayaran PBB-P2 secara *realtime* melalui Aplikasi Smartgov
- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.

Indikator 2 : Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)

Tabel 3.16
 Capaian Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	%	100	102,53	102,53	100	106,84	106,84	100	107,56	107,56
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										107,56

Tabel 3.17
 Capaian Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	%	100	107,56	107,56	100	107,56

Realisasi Pajak Daerah tahun (kecuali PBB-P2 dan BPHTB) sebesar Rp 37.957.213.864,- terhadap target APBD-P Rp 35.290.000.000 atau sebesar 107,56%. Ini melebihi target Renja Perubahan 2023 dan target akhir Renstra 2018-2023 sebesar 100%. Pencapaian diatas 100% ini sudah terjadi dari 2019-2022. Realisasi Pajak Daerah (Non PBB-P2 dan BPHTB) di tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022. Peningkatan realisasi sebesar Rp 4.305.881.047 (12,80%) dari tahun 2022. Secara rinci Pajak Restoran meningkat Rp 1.927.267.338,- (40,22%), Pajak Hiburan Rp 22.201.100,- (33,98%), Penerangan Jalan Rp 1.178.734.257 (4,73%), Parkir Rp 97.564.800,- (82,41%), Air Tanah 8,55% (Rp 116.024.341,-), Sarang Burung Walet Rp 3.534.200,- (4,71%), serta Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp 1.077.644.250 (66,15%). Hanya Pajak Hotel yang menurun 16,84% dan Reklame 17,46%. Sedangkan jika dilihat dari target APBD-P 2023, Hanya Pajak Hotel, Hiburan, dan Reklame yang realisasinya di bawah 90%.

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Secara aktif mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban pajak daerah per bulan
- 2) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak
- 3) Turun ke lapangan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah,

- 4) Pemberian *reward* kepada wajib pajak Restoran dan Hotel, dan pelanggan dari Restoran dan Hotel yang membayar pajak.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak Daerah untuk melaporkan perpajakannya secara rutin.
- 2) Wajib Pajak Dearah tidak aktif memasukkan SPTPD secara Mandiri melalui e-SPTPD
- 3) Masih kurangnya petugas penagihan dan pengawasan Pajak Daerah

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu:

- 1) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah
- 2) Mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
- 3) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah

Indikator 3 : Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2

Tabel 3.18
Capaian Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	%	2,60	12,91	496,63	2,30	1,37	59,46	2,00	6,00	299,87
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										299,87

Tabel 3.19
Capaian Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	%	2,00	6,00	299,87	2,00	299,87%

Penerimaan dari tunggakan (piutang pokok dan denda) PBB-P2 beserta dendanya pada tahun 2023 sebesar Rp 2.249.716.023, sedangkan jumlah piutang pokok beserta denda yang diperoleh dari data Bidang Pengelolaan Pajak Daerah sebesar dari tahun 2023 senilai Rp 37.511.163.890,-. Penerimaan ini dari tunggakan tahun-tahun sebelumnya sampai akhir tahun 2022. Secara persentase tunggakan PBB-P2 yang terealisasi $2.249.716.023/37.511.163.890 \times 100 = 6,00\%$, artinya tunggakan PBB-P2

yang dapat ditagih sebesar 6,00%. Realisasi ini diatas target tahun 2023 sebesar 2,00%.

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui aplikasi SIM PBB
- 2) Menyampaikan surat tagihan kepada Subjek PBB-P2 yang berdomisili diluar Kabupaten Tanah Laut
- 3) Mendatangi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan
- 4) Menghubungi Wajib Pajak via Telepon untuk melakukan penagihan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu

- 1) Piutang PBB-P2 hanya ditampilkan maksimal 5 tahun pada SPPT
- 2) Subjek PBB-P2 tidak mengetahui semua piutang PBB-P2 di atas 5 Tahun
- 3) Adanya piutang PBB-P2 dari perusahaan yang pailit / tidak beroperasi lagi.
- 4) Alamat Subjek PBB-P2 yang tidak jelas, sehingga penyedia jasa pengiriman mengembalikan surat tagihan
- 5) Adanya objek PBB-P2 yang tidak ditemukan.

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui database PBB-P2
- 2) Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
- 3) Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan/Perusahaan.

b. Sasaran Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah (P2D)

Ada 3 sasaran program yang menjadi Kinerja Utama dari Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, dimana 3 Kinerja Utama ini memiliki masing-masing 1 Indikator Kinerja (3 Indikator Kinerja). Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang P2D memiliki 2 Kepala Sub Bidang, 1 JFT, 2 JFU, 7 PTT dengan anggaran Rp 1.043.669.976,-, dimana anggaran yang terealisasi sebesar Rp 879.006.950,- (84,22%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.20
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Kabid Pengelolaan Pajak Daerah

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6,5%	6,43%	101,04%
2.	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%	100%	100%
3.	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%	100%	100%

Indikator 1 : Persentase penurunan data Pajak Daerah yang tidak valid

Tabel 3.21
Capaian Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase penurunan data Pajak Daerah yang tidak valid	%	8	20,92	-61,48	6	5,27	112,17	6,5	6,43	101,04
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										101,04

Tabel 3.22
Capaian Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase penurunan data Pajak Daerah yang tidak valid	%	6,5	6,43	101,04	4	39,18

Valid yang dimaksud disini adalah validasi data PBB-P2 bagi wajib pajak yang sebelumnya akan didata/diverifikasi terlebih dahulu kelengkapan administrasinya, agar data yang disampaikan lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada. Tidak validnya data seperti nama/alamat wajib pajak yang keliru (berbeda nama/alamatnya dengan nama di KTP, luas tanah yang salah/tidak sesuai dengan ukuran), dan lain-lainnya, sehingga tidak bisa diproses untuk dihitung dan ditetapkan hingga terbitnya SPPT bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Perolehan realisasi yang didapat hingga akhir tahun 2023, terdapat 8.793 data Wajib Pajak yang tidak valid dari 136.692 Wajib Pajak. Secara persentase, data wajib pajak yang tidak valid sebesar **8.793/136.692x100 =**

LKj BAPENDA TAHUN 2023

6,43%. Realisasi ini lebih rendah dari target sebesar 6,5%. Sehingga dapat dikatakan validasi data wajib pajak yang dikerjakan Bidang P2D berhasil melebihi target Renja Perubahan 2023 atau dengan capaian 101,04%. Jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,27%, realisasi 2023 meningkat. Hal ini dikarenakan data wajib pajak lebih banyak dari tahun 2022 serta banyaknya pembetulan data.

Upaya yang sudah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini, yaitu :

- 1) Pemutakhiran data pajak PBB-P2 yang dilakukan Bidang P2D di Kecamatan Bati-Bati
- 2) Melaksanakan fasilitasi untuk mendukung dan menyelesaikan persoalan balik nama hak atas tanah Masyarakat di lahan eks transmigrasi pada program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala) yang diinisiasi Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri dan Dinas terkait.
- 3) Melaksanakan fasilitasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (program PTSL).

Adapun kendala yang dihadapi pada indikator ini, yaitu:

- 1) Pemutakhiran hanya dapat dilakukan 1 kecamatan per tahun dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan di banyak kecamatan
- 2) Ketidakvalidan data baru diketahui saat ada aduan.

Adapun upaya perbaikan kinerja pada tahun 2024 ini adalah Pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Pelaihari dengan keluarahan/desa yang akan ditentukan kembali.

Indikator 2 : Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah

Tabel 3.23
Capaian Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										100

Tabel 3.24
 Capaian Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah
 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	%	100	100	100	100	100

11 Jenis Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB-P2, dan BPHTB, terhadap tagert tahun 2023 yang sudah ditetapkan dapat direalisasikan semua, sehingga dapat dikatakan 11 jenis Pajak Daerah ini dapat dijadikan potensi pendapatan Pajak Daerah atau dapat dikatakan realisasi potensinya 100%. Bidang P2D dalam realisasi 11 Jenis Pajak Daerah ini kembali mengulangi capaian tahun sebelumnya. Berikut ini realisasi 11 Pajak Daerah terhadap target APBD-P 2023 berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran – Pendapatan Konsolidasi Kabupaten Tanah Laut 2023 :

	Pajak Daerah	Target	Realisasi	%
1.	Hotel	88.500.000	73.185.181	82,70
2.	Restoran	5.450.000.000	6.719.528.786	123,29
3.	Hiburan	100.000.000	87.546.100	87,55
4.	Reklame	600.000.000	483.487.290	80,58
5.	Penerangan Jalan	25.455.000.000	26.119.223.496	102,61
6.	Parkir	210.000.000	215.947.600	102,83
7.	Air Tanah	1.311.500.000	1.473.151.695	112,33
8.	Sarang B. Walet	75.000.000	78.524.200	104,70
9.	PMBLB	2.000.000.000	2.706.619.515	135,33
10.	PBB-P2	5.350.000.000	5.801.326.159,00	108,44
11.	BPHTB	8.660.000.000	8.890.005.641,00	102,66

Keberhasilan ini bisa diraih karena adanya koordinasi dengan Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan (P3) dengan menyerahkan data yang diperlukan Bidang P3 untuk dilakukan penagihan dan pengawasan.

Upaya yang sudah dilakukan untuk keberhasilan indikator ini, yaitu :

- 1) Pemutakhiran data pajak PBB P2 yang dilakukan bidang P2D di kecamatan Bati-Bati.
- 2) Pendataan pajak parkir pada seluruh retail (indomaret dan alfamart) yang Berusaha di wilayah Kabupaten Tanah Laut
- 3) Upgrade alat perekam data transaksi pembayaran pajak secara online sebanyak 10 (sepuluh) unit untuk wajib pajak hotel dan restoran.

- 4) Melakukan kebijakan menaikkan 1 (satu) tingkat dari kelas semula Nilai Jual Objek Pajak Bumi sebagai dasar pengenaan PBB P2 terutang Tahun 2023
- 5) Melaksanakan fasilitasi untuk mendukung dan menyelesaikan persoalan balik nama hak atas tanah Masyarakat di lahan eks transmigrasi pada program Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah eks Transmigrasi (Kijang Mas Tala) yang diinisiasi Kantor Pertanahan, Pengadilan Negeri dan Dinas terkait.
- 6) Melaksanakan fasilitasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (program PTSL).

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator, yaitu :

- 1) Subjek pajak PBB P2 yang didata pada umumnya sulit ditemukan karena berada diluar wilayah.
- 2) Perencanaan anggaran untuk pemberian insentif petugas desa belum optimal.
- 3) Setelah diinformasikan jumlah piutang PBB P2 ada kecenderungan dari subjek pajak PBB P2 keberatan atau tidak bersedia melunasi piutang.
- 4) Data perijinan usaha retail (indomaret dan alfamart) terkait pendataan pajak parkir belum diinformasikan ke Bapenda sehingga menyebabkan saat dilakukan pendataan tidak diketahui secara persis tempat/titik usahanya.
- 5) Wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran pada umumnya tidak bersedia dipasang alat perekam.
- 6) Wajib pajak PBB P2 baik pribadi maupun badan setelah menerima SPPT PBB P2 terutang pada umumnya keberatan membayar.
- 7) Personil kesulitan memproses transaksi BPHTB pada program Kijang Mas Tala karena yang menangani cuma 1 (satu) orang.
- 8) Personil kesulitan memproses transaksi BPHTB pada program PTSL karena yang menangani cuma 1 (satu) orang.

Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada 2024, yaitu :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan petugas desa lebih intensif sehingga tidak ditemukan lagi kendala.
- 2) Perencanaan anggaran untuk pemberian insentif petugas desa lebih dioptimalkan
- 3) Meningkatkan kesadaran wajib pajak dengan cara melaksanakan sosialisasi sehingga diharapkan bersedia membayar pajak

- 4) Melaksanakan koordinasi dengan dinas yang menangani perijinan dan mengintegrasikan data perijinan dengan data wajib pajak yang ada di Bapend secara by system
- 5) Menghimbau pada wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku
- 6) Jumlah personil yang memproses transaksi BPHTB pada program Kijang Mas Tala dan program PTSL supaya ditambah jumlahnya

Indikator 3 : Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah

Tabel 3.25
Capaian Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										100

Tabel 3.26
Capaian Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	%	100	100	100	100	100

Target penetapan wajib pajak pada tahun 2023 sebesar 134.269 ketetapan. Realisasi pembuatan ketetapan sesuai target 100%, dimana pada Triwulan II bisa dicetak semua. Ketetapan yang dicetak inilah yang diharapkan dapat merealisasikan target PBB-P2 pada APBD-P 2023. Capaian indikator ini terhadap target akhir Renstra sebesar 100%.

Adapun kendala dalam merealisasikan target ini adalah masih adanya mutasi/perubahan data wajib pajak tahun berjalan berupa luasan objek tanah dan bangunan di tahun 2023 ini.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk menghadapi kendala dan target 2023 dapat direalisasikan, yaitu:

- 1) Melakukan cetak massal ketetapan pada bulan Mei 2023
- 2) Pemutakhiran data PBB-P2 yang dilakukan Bidang P2D di Kecamatan Bati-Bati.
- 3) Pelayanan pemutakhiran data diacara Manunggal Tuntung Pandang dan juga di Kantor Badan Pendapatan Daerah.

- Adapun upaya perbaikan kinerja yang akan dilakukan di 2024, yaitu :
- 1) Melakukan cetak massal secepatnya di bulan Februari.
 - 2) Melakukan pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan Pelaihari dengan keluarahan/desa yang akan ditentukan kembali

c. Sasaran Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Ada 2 sasaran yang menjadi kinerja utama Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan yang memiliki 3 Indikator Kinerja. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Kepala Bidang memiliki 2 Kepala Sub Bidang, dan 2 JFU dengan anggaran Rp 182.027.726,-, dimana anggaran yang terealisasi Rp 132.845.400 (72,98%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.27
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Kabid Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1,85%	2,04%	110,37%
2.	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1,90%	2,01%	105,97%
		2.	Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah	0,76%	10,11%	1330,21%

Indikator 1 (Sasaran 1): Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah

Tabel 3.28
Capaian Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	%	5,00	-15	-294	5,00	48,86	977,20	1,85%	2,04%	110,37%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										110,37%

Tabel 3.29
 Capaian Persentase Peningkatan Pendapatan Lain-Lain dan Retribusi Daerah
 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	%	1,85%	2,04%	110,37%	5,00	40,84

Pendapatan lain-lain yang dimaksud disini adalah jumlah dari Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi yang dicapai pada Indikator ini **sebesar 2,04%** dari target Renja Perubahan 2023 sebesar 1,85%. Meningkatnya realisasi ini dikarenakan Transfer Pemerintah Pusat yang meningkat 1,21% dari tahun 2022, meningkatnya Tranfer Antar Daerah 10,51%, dan meningkatnya Retribusi daerah 10,11%, walaupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah menurun 86,54%. Adapun Perhitungannya sebagai berikut :

Real. Pendapatan Transfer 2022 : Rp 2.003.859.813.167,27
 Real Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah 2022: Rp 288.473.848,00
 Real. Hasil Pengelolaan Kekayaan DyD 2022 : Rp12.005.672.488,00 +
 Real. Pendapatan Lain-lain (PLL) 2022 : Rp 2.016.153.959.503,27
 Realisasi Retribusi 2023 : Rp 7.676.400.350,00 +
 Realisasi PLL dan Retribusi 2023 : Rp 2.023.830.359.853,27
 Realisasi PLL dan Retribusi 2022 : Rp 1.983.332.053.737,00

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi 2023} &= (\text{Real. PLL \& Retribusi 2023} - \text{Real. PLL \& Retribusi 2022}) / \text{Real. PLL \& Retibusi 2022} \times 100 \\
 &= (2.023.830.359.853,27 - 1.983.332.053.737,00) / \\
 &\quad 1.983.332.053.737,00 \times 100 = 2,04\%
 \end{aligned}$$

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Berkoordinasi dengan Provinsi dan Pusat terkait Dana Transfer
- 2) Melaksanakan monev terhadap target dan pendapatan retribusi SKPD
- 3) Melakukan sosialisasi dan mengirimkan surat ke SKPD untuk segera melaksanakan Transaksi Non Tunai / Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)
- 4) Menyurati Bank Kalsel agar memfasilitasi penyediaan QRIS dan EDC

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Koordinasi hanya dapat dilakukan via telepon, karena kendala waktu yang tersedia
- 2) Dana transfer tidak sesuai jadwal
- 3) SKPD masih belum memahami tentang transaksi non tunai dari segi pendapatan dan merasa kesulitan menerapkan di masyarakat
- 4) Bank Kalsel sebagai bank rujukan RKUD belum menyiapkan / belum memenuhi permintaan untuk menyediakan QRIS bagi Bendahara Penerima dan IBB

Adapun perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Mensosialisasikan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
- 2) Meningkatkan Koordinasi ke Pusat dan Provinsi berkenaan dengan Dana-Dana Transfer
- 3) Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukseskan Transaksi Non Tunai
- 4) Memantau perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
- 5) Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 6) Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Indikator 1 (Sasaran 2): Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah

Tabel 3.30
Capaian Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	%	4,54	-14,65	-323	4,50	48,98	1088.42	1,90	2,01	105,97
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										105,97

Tabel 3.31
 Capaian Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	%	1,90%	2,01%	105,97%	4,32	46,61

Penerimaan lain-lain pendapatan daerah disini maksudnya Pendapatan Lain-lain seperti penjelasan pada indikator sebelumnya. Realisasi Pendapatan lain-lain tahun 2022 sebesar Rp 1.976.360.455.730,-, sedangkan tahun 2023 sebesar Rp. 2.023.830.359.853,27,-, sehingga dapat dikatakan realisasi Penerimaan lain-lain pendapatan daerah tahun 2023 **meningkat 2,01%** dari tahun 2022, serta melebihi target Renja Perubahan 2023 sebesar 1,90%. Hal ini dikarenakan alasan yang sama dengan indikator sebelumnya, yakni Transfer Pemerintah Pusat yang meningkat 1,21% dari tahun 2022, dan meningkatnya Tranfer Antar Daerah 10,51%. Capaian dari realisasi tahun 2023 terhadap target akhir Renstra sebesar 46,61%, dimana realisasi tahun 2023 ini dibawah target Renstra.

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Sudah dilakukan koordinasi dengan Pusat dan Provinsi dalam hal dana transfer
- 2) Secara aktif mencari informasi terkait dana transfer
- 3) Telah berkoordinasi dengan SKPD yang menangani Badan / Lembaga / Organisasi Swasta untuk meminta daftar keberadaan organisasi dan akan dijadwalkan untuk mengajak berkontribusi.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Belum ada kertas kerja terkait perhitungan DBH dari Provinsi
- 2) Kesulitan dalam melakukan koordinasi terhadap Badan / Lembaga / Organisasi Swasta yang berusaha di Tanah Laut, karena pemilik usaha tidak berdomisili di Tanah Laut

Adapun perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Pusat dan Provinsi berkenaan pendapatan bagi hasil dan dana transfer lainnya

- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak swasta berkenaan pendapatan hibah

Indikator 2 (Sasaran 2) : Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah

Tabel 3.32
Capaian Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi	%	0,96	-23,59	-2457,69	0,76	21,39	2814,44	0,76%	10,11%	1330,21%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										344,42%

Tabel 3.33
Capaian Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi	%	0,76%	10,11%	1330,21%	0,76	1330,21

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp 7.676.400.350,- dari target APBD-P 2023 sebesar Rp 8.506.734.000,-, artinya realisasi tahun 2023 terhadap target sebesar 90,24%, dengan rincian Retribusi Jasa Umum 84,09%, Retribusi Jasa Usaha 88,45%, dan Retribusi Perizinan Tertentu 118,18%. Realisasi Retribusi tahun 2023 lebih tinggi dari tahun 2022 sebesar 704.802.343,00. Artinya terjadi **pertumbuhan** penerimaan lain-lain pendapatan daerah sebesar **10,11%** dari tahun 2022. Realisasi tahun 2023 bahkan lebih tinggi dari tahun 2020 sebesar Rp 159.789.283,00.

Upaya yang sudah dilakukan Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD dalam memperhitungkan target pendapatan, memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan yang tercapai dan tidak tercapai
- 2) Sosialisasi terhadap SKPD dan masyarakat
- 3) Bekerjasama dengan Bank Kalsel untuk menyiapkan kanal-kanal dan fitur yang memudahkan dalam transaksi

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) SKPD Pengelola Retribusi terlalu tinggi dalam memasang target pendapatan, tidak memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya, sehingga terkesan target retribusi tidak tercapai.
- 2) ETPD adalah hal baru dari segi pendapatan, sehingga SKPD merasa sulit untuk menerapkan dalam pengelolaan Retribusi.

Adapun perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, potensi Retribusi Daerah pada SKPD diupayakan meningkat
- 2) Mengarahkan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya
- 3) Mengupayakan transaksi non tunai dalam setiap transaksi pendapatan retribusi

d. Sasaran Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Ada 1 Sasaran Strategis yang menjadi Kinerja Utama dengan 5 Indikator Kinerja yang diemban oleh Sekretaris. Untuk memenuhi target dari indikator kinerja ini, Sekretaris membawahi 2 Kepala Sub Bagian, 3 JFU, dan 3 PTT dengan anggaran Rp 11.016.614.374,-, dimana anggaran yang terealisasi Rp 9.462.643.750,- (85,89%). Berikut ini, Indikator Kinerjanya beserta targetnya:

Tabel 3.34
Tabel Target dan Realisasi Sasaran Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 (B)	88,89 (A)	109,74%
	2.	Nilai Hasil Evaluasi RB	-	-	-
	3.	Nilai Hasil Evaluasi ZI	78 (BB)	78,17 (BB)	100,21%
	4.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)	79,25 (BB)	101,60%
	5.	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%

Indikator 1 : Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

Tabel 3.35

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	79 (B)	81,07 (B)	102,62	80 (B)	84,72 (A)	105,90%	81 (B)	88,89 (A)	109,74%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										

Tabel 3.36

Capaian Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	81 (B)	88,89 (A)	109,74%	81 (B)	109,74%

Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah disini adalah nilai kepuasan internal Badan Pendapatan Daerah terhadap Sekretariat dalam menyelenggarakan urusan kesekretariatan. Pada tahun 2023 ini, nilai yang diperoleh sebesar 88,89 atau kategori A, ini lebih tinggi dari target nilai 81 (B).

Upaya yang sudah dilakukan Sekretariat Bapenda selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Telah diusulkan revisi SOTK yang telah diajukan ke Bagian Organisasi untuk ditindaklanjuti
- 2) Telah selesai dilakukan rehabilitasi ruang rapat sehingga lebih luas dan representatif.
- 3) Telah dilakukan pasang baru kwh listrik di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah, agar server tetap selalu hidup
- 4) Telah dilakukan pemeliharaan instalasi listrik untuk menunjang kegiatan di kantor.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk keberhasilan pada Indikator ini pada tahun 2023, yaitu:

- 1) SOTK yang ada sekarang masih ada ketidaksesuaian dengan Tupoksi di bidang-bidang
- 2) Ruang Rapat kurang luas dan tidak memadai
- 3) Sering terjadi masalah listrik karena usia kabel yang menyebabkan korsletng listrik

- Adapun perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :
- 1) Penambahan daya Isitrik agar pelayanan lebih lancar
 - 2) Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor agar pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan lebih nyaman dan bagus, serta tertib administrasi

Indikator 2 : Nilai Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi)

Tabel 3.37
Capaian Nilai Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi)	Nilai	76 (BB)	73,74 (BB)	97,03	77 (BB)	64,15 (B)	83,31%	-	-	-
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										-

Tabel 3.38
Capaian Nilai Hasil Evaluasi RB (Reformasi Birokrasi) 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	-	-	-	78 (BB)	-

Evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 ini tidak lakukan dikarenakan masih dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan oleh Bagian Organisasi Setda, walaupun demikian, Sekretariat Bapenda sudah mempersiapkan bahan untuk evaluasi.

Upaya yang sudah dilakukan Sekretariat Bapenda selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Sudah mengajukan penyederhanaan struktur sesuai tupoksi
- 2) Sudah dilaksanakan pembenahan/perubahan ruang pelayanan dan ruang rapat
- 3) Sudah diadakan rapat intern yang membahas target dan capaian kinerja
- 4) Inovasi sedang dalam proses pengembangan untuk memperbaiki pelayanan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Bagan struktur organisasi / tupoksi tumpang tindih
- 2) Pelayanan publik perlu dibenahi
- 3) Perlu adanya pertemuan dengan Tim Reformasi Birokrasi
- 4) Perlu menambah dan mengembangkan inovasi

Adapun pada tahun 2024 nanti, penilaian RB hanya di level Kabupaten atau tidak lagi di SKPD.

Indikator 3 : Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas)

Tabel 3.39
Capaian Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas)

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas)	Nilai	-	-	-	77 (BB)	85,77 (A)	111,4%	78 (BB)	78,17 (BB)	100,21%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										100,21%

Tabel 3.40
Capaian Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas) 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai Hasil Evaluasi ZI (Zona Integritas)	Nilai	78 (BB)	78,17 (BB)	100,21%	78 (BB)	100,21%

Upaya yang sudah dilakukan Sekretariat Bapenda selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Memperbaiki Capaian Kinerja dan Nilai SAKIP
- 2) Menindaklanjuti temuan-temuan BPK dan berkoordinasi dengan Bidang
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan bidang dalam pengisian ZI dan mengadakan Rapat Intern secara berkala
- 4) Survey Pelayanan Masyarakat dibuat secara berkala setiap triwulan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama tahun 2023 untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Nilai ZI dipengaruhi beberapa penilaian yang lain, seperti Nilai SAKIP tahun 2022 menurun, sehingga mempengaruhi nilai ZI
- 2) Indikator Nilai SAKIP ada yang bukan tupoksi Bapenda sehingga apabila indikator itu tidak terlaksana maka akan membuat nilai SAKIP Bapenda kurang/turun
- 3) Temuan-temuan dari BPK sudah ditindaklanjuti tetapi sebagian masih proses / belum tuntas
- 4) SOP belum ada perbaikan.

- Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :
- 1) Tetap berkomitmen dalam membangun Zona Integritas dan lebih meningkatkan kinerja, sehingga nilai dapat ditingkatkan dan dapat diusulkan untuk dilakukan penilaian oleh TPN.
 - 2) Meningkatkan nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah agar dapat berdampak pada peningkatan pada nilai SAKIP Kabupaten, sehingga SKPD yang telah mendapat predikat WBK dapat mempertahankan dan dapat ditingkatkan untuk mendapatkan predikat WBBM.
 - 3) Menindaklanjuti temuan yang ditemukan BPK ataupun BPKP sampai selesai/tuntas
 - 4) Memperbaiki nilai berdasarkan survey pelayanan masyarakat secara berkala.

Indikator 4 : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

Tabel 3.41
Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	76 (BB)	83,11 (A)	109,36%	77 (BB)	77,2 (BB)	100,26%	78 (BB)	79,25 (BB)	101,60%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										101,60%

Tabel 3.
Capaian Nilai Hasil Evaluasi SAKIP 2023 Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	78 (BB)	79,25 (BB)	101,60%	78	101,60%

Nilai Evaluasi SAKIP 2023 atas kinerja tahun 2022 mendapatkan nilai 79,25 (BB) dengan rincian pada komponen Perencanaan Kinerja mendapatkan nilai 24, Pengukuran Kinerja 24, Pelaporan Kinerja 12, dan Evaluasi Akuntabilitas Internal 19,25.

- Adapun upaya yang sudah dilakukan pada Indikator ini, yaitu :
- 1) Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan per triwulan
 - 2) Memperhatikan perencanaan kinerja agar selaras.
 - 3) Menampilkan perbandingan IKU dengan Kabupaten lain pada Laporan Kinerja.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi untuk keberhasilan pada Indikator ini, yaitu:

- 1) Bapenda sampai triwulan I tahun 2023, belum pernah membuat monitoring evaluasi dan reuiu berjenjang per triwulan.
- 2) Ada 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target, sehingga mengurangi kesempatan Bapenda untuk mendapatkan nilai A pada Evaluasi SAKIP.

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Membuat monev dan reuiu untuk Eselon II, III, dan IV
- 2) Mempertahankan perencanaan kinerja yang sudah selaras
- 3) Menunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja agar menjamin keandalan data kinerja
- 4) Menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi APIP

Indikator 5 : Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

Tabel 3.42

Capaian Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2023										100

Tabel 3.43

Capaian Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti Terhadap Target Akhir Renstra

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2023			TARGET AKHIR Renstra	CAPAIAN TAHUN 2023 THD TARGET AKHIR Renstra
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100

Ada 2 temuan pada kinerja tahun 2022 yang ditemukan BPK pada pemeriksaan tahun 2023, temuan pertama adalah Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang belum Memadai, dan kedua adalah Pengelolaan PBB-P2 Belum Optimal. Kedua temuan itu sudah ditindaklanjuti sehingga dapat dikatakan 100%.

Upaya yang sudah dilakukan Sekretariat Bapenda selama 2023 untuk keberhasilan Indikator ini, yaitu :

- 1) Membuat Intruksi Kepala Badan Pendapatan Daerah yang ditujukan kepada Bidang-Bidang untuk ditindaklanjuti
- 2) Dilaksanakannya rekonsiliasi pencocokan bendahara penerimaan (RKUD) dengan SIMDA Pendapatan

Adapun kendala-kendala yang dihadapi pada Indikator ini adalah :

- 1) Perlu usaha lebih agar wajib Pajak Hotel dan Restoran bersikap kooperatif.
- 2) Belum adanya metode pengawasan pembayaran PBB-P2 per desa secara realtime berbasis teknologi informasi

Adapun upaya perbaikan yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu berkoodinasi dengan bidang-bidang untuk menindaklanjuti apabila ada temuan dari BPK/Inspektorat, dan diusahakan sampai tuntas agar dapat meningkatkan penilaian ZI nantinya.

4. Eselon IV

a. Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Tabel 3.44
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil	1	1	100%
	Pelaksanaan Penagihan	Dokumen	Dokumen	
	Pajak Daerah			

Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya, dimana Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebanyak 1 Dokumen sudah diselesaikan di tahun 2023. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah untuk mencapai target, dijalankan oleh 1 orang sebagai Kasubbid Penagihan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, 2 orang JFU, dan 1 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dengan anggaran sebesar Rp 839.135.121 yang terealisasi sebesar Rp 586.964.175 (69,95%). Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah aktif melakukan penagihan untuk merealisasikan 11 jenis Pajak Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Menghimpun surat yang diterbitkan dan dokumentasi dalam rangka melaksanakan penagihan pajak daerah

- 2) Melaksanakan penagihan kepada wajib pajak daerah
- 3) Inventarisasi penerima insentif PBB (kolektor PBB)

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini yaitu:

- 1) Tahapan realisasi sub kegiatan dilaksanakannya pada Triwulan IV
- 2) Realisasi belanja tenaga ahli (kolektor PBB-P2) belum maksimal
- 3) Jumlah SDM yang kurang

Adapun perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2024, yaitu :

- 1) memperhitungkan kembali (mengurangi/pergeseran) anggaran belanja tenaga ahli (kolektor PBB-P2) pada perubahan APBD 2024
- 2) Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
- 3) Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.
- 4) Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
- 5) Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan/Perusahaan
- 6) Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah

b. Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Tabel 3.45
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan, Pengendalian Dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya, dimana Jumlah dokumen hasil pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pajak daerah sebanyak 1 Dokumen sudah dibuat di tahun 2023. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, 2 orang JFU, dan 1 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 127.955.173,- yang terealisasi

sebesar Rp 107.917.500,- (84,34%). Sub Bidang ini aktif melakukan pemeriksaan, monitoring dan monitoring terhadap objek pajak dari 11 jenis Pajak Daerah agar target bisa terealisasi.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Melakukan uji petik pada triwulan IV
- 2) Memaksimalkan SDM yang ada untuk melaksanakan kegiatan

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini yaitu:

- 1) Kegiatan perjalanan dinas dalam kota yang baru bisa dilaksanakan setelah pengesahan RKAP (Rencana Kegiatan Anggaran Perubahan) tahun 2023
- 2) Jumlah SDM yang kurang memadai

Adapun perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2024, yaitu

- 1) Mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
- 2) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah

c. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Tabel 3.46
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelohan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100%
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mengemban 3 Kinerja Utama. Pada Tahun 2023, Indikator dari 3 Kinerja Utama sudah dilaksanakan sesuai targetnya, dimana target dan realisasinya sama. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFT, dan 3 orang PTT dengan

anggaran sebesar Rp 873.711.585,- yang terealisasi sebesar Rp 732.932.000,- (83,89%). Sub Bidang ini aktif melakukan pendataan, pendaftaran, dan penetapan terhadap wajib pajak, serta pengolahan basis data dari 11 jenis Pajak Daerah agar target bisa terealisasi.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran baik objek atau subjek pajak menggunakan tenaga non PNS yang ada
- 2) Pembaruan / upgrade sistem / aplikasi pengolahan data Pajak Daerah dengan aplikasi Smartgov
- 3) Pengintegrasian data dengan aplikasi Smartgov

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini yaitu:

- 1) Sistem / Aplikasi yang digunakan belum menyajikan data secara valid dan benar
- 2) SDM tidak memadai, hanya memiliki 1 staf PNS

Adapun upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk perbaikan kinerja, yaitu :

- 1) Melakukan pendataan dan pemutakhiran Pajak Daerah, termasuk pemutakhiran PBB-P2 di Kecamatan Pelaihari di kelurahan/desa yang akan ditentukan
- 2) Menghimbau pada wajib pajak daerah yang sudah dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku

d. Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Tabel 3.47
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8.000 Layanan	8.000 Layanan	100%

Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah sudah melaksanakan tugas sesuai targetnya di tahun 2023, dimana 8.000 Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah dilaksanakan, atau dengan capaian 100%. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pelayanan Pajak Daerah dibantu 1 orang JFU, dan 4 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 169.958.391 yang terealisasi sebesar Rp 146.074.950 (85,95%). Sub Bidang ini aktif melakukan

pelayanan terhadap wajib pajak dari 11 jenis Pajak Daerah agar target APBD-P tahun 2023 bisa terealisasi.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Berkomunikasi dengan BPKP untuk perbaikan aplikasi Simda Pendapatan
- 2) Usul Pemeliharaan instalasi listrik yang sudah dilaksanakan Sekretariat
- 3) Membuat google sheet untuk data-data berkas yang masuk agar dapat dipantau proses penyelesaian berkas
- 4) Membuat google sheet untuk rumusan perhitungan kertas kerja pajak ABT, sehingga dapat diakses semua petugas operator.
- 5) Menyediakan fasilitas air minum gratis untuk wajib pajak yang datang membayar

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini yaitu:

- 1) Kerusakan aplikasi Simda Pendapatan
- 2) Listrik di Pelayanan Pajak Daerah sering padam
- 3) Kurang optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia seperti komputer yang cukup berumur sehingga perlu peremajaan,
- 4) Perlunya perlengkapan jaringan dan fasilitas perlengkapan layanan publik

Adapun upaya yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk perbaikan kinerja, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak yang datang untuk membayar kewajibannya.

e. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan dan Perencanaan Pendapatan

Tabel 3.48
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	6 Dokumen	100%

Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan mengemban 2 sub kegiatan dengan total 2 Indikator. Semua target dari indikator sudah dilaksanakan di tahun 2023.

Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan dibantu 1 orang JFT dan 1 orang JFU dengan anggaran sebesar Rp 82.705.418 yang terealisasi sebesar Rp 51.967.900 (62,83%). Sub Bidang ini aktif melakukan perencanaan pendapatan daerah serta koordinasi dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar target bisa terealisasi sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Berkoordinasi dengan Bidang Anggaran BPKAD agar TKDD 2023 tahun berjalan dimasukkan di R-P. APBD 2024
- 2) Telah dilaksanakan koordinasi baik melalui seluler, surat, dan koordinasi secara langsung sebagai upaya untuk peningkatan pendapatan transfer

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini yaitu:

- 1) Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah pada Triwulan II, target pendapatan belum ditetapkan, masih dalam tahapan KUA & PPAS dan dirapatkan dengan Badan Anggaran DPRD Kab. Tanah Laut untuk disahkan atau mendapat persetujuan
- 2) Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah pada Triwulan III, Dokumen Target Pendapatan R-P. APBD 2023 masih dalam tahapan evaluasi Gubernur Prov. Kalimantan Selatan, dan masih ada TKDD yang belum dimasukkan. Dokumen Target Pendapatan R-APBD 2024 tahapan masih nota keuangan dan pada saat tahapan ini TKDD 2024 belum dimasukkan sebagai proyeksi target pendapatan.
- 3) Terdapat beberapa rencana yang tidak dapat direalisasikan sehubungan dengan banyaknya beban pekerjaan, sementara SDM kurang terpenuhi.

Adapun upaya perbaikan untuk kinerja 2024, yaitu :

- 1) Melaksanakan koordinasi dengan Pusat dan Provinsi berkenaan pendapatan bagi hasil dan dana transfer lainnya
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak swasta berkenaan pendapatan hibah

f. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Tabel 3.49
Tabel Target dan Realisasi Sub Bidang Retribusi Daerah

Kinerja Utama	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%

Realisasi dari target 2 Laporan sudah terlaksana atau dengan capaian 100%. Sub Bidang ini untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbid Retribusi Daerah dibantu 1 orang JFU dengan anggaran sebesar Rp 99.322.308 yang terealisasi sebesar Rp 80.877.500 (81,43%). Sub Bidang ini aktif melakukan koordinasi dengan SKPD penghasil retribusi daerah agar target bisa terealisasi sehingga dapat meningkatkan PAD.

Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :

- 1) Melaksanakan Monev dengan kegiatan rapat koordinasi pada setiap triwulan
- 2) Melaksanakan High Level Meeting (HLM) pada triwulan III untuk membahas transaksi eletronifikasi.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini, yaitu:

- 1) Beberapa SKPD Penghasil agak lambat dalam menyampaikan Laporan Realisasi Penerimaan
- 2) Belum semua Bendahara Penerimaan membuat nomor rekening di Bank Kalsel untuk kemudahan transaksi elektronifikasi

Adapun upaya perbaikan kinerja pada tahun 2024, yaitu :

- 1) Mensosialisasikan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
- 2) Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukseskan Transaksi Non Tunai
- 3) Koordinasi dengan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya

g. Kepala Sub Perencanaan dan Keuangan

Tabel 3.50
Tabel Target dan Realisasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang / Bulan	29 Orang / Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	18 Dokumen	100%

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mengemban 4 Kinerja Utama dengan 4 Indikator. Pembuatan dokumen perencanaan, laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, penggajian, dan dokumen penatausahaan menjadi indikator taget di sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ini. Semua target dari indikator sudah dilaksanakan sehingga dapat dikatakan target sudah teralisasi semua.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan untuk mencapai target dijalankan oleh 1 Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dibantu 2 orang JFU dan 1 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 8.937.132.455 yang terealisasi sebesar Rp 7.563.023.780 (84,62%).

- Upaya yang sudah dilakukan pada tahun 2023 ini, yaitu :
- 1) Mengingatkan kepada bidang-bidang, dan sub bagian umum & kepegawaian untuk segera merealisasikan keuangan
 - 2) Mengusahakan pergeseran pada anggaran yang kurang
 - 3) Membuat Form Monev dan Reviu berjenjang untuk kelengkapan SAKIP

- 4) Insentif Retribusi Daerah diusahakan dipindah ke masing-masing SKPD, dimana usaha ini dilaksanakan Bidang Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023 ini, yaitu:

- 1) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang tidak maksimal dari SKPD pemungut sehingga realisasi insentif retribusi daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 2) Pada penilaian SAKIP, sampai triwulan I 2023, Bapenda belum pernah membuat Form Monev dan Reviu berjenjang terhadap realisasi kinerja.
- 3) Kurang mengalokasikan anggaran tunjangan fungsional.
- 4) Pekerjaan dari Sub Bagian Perencanaan yang bisa berbarengan dengan Sub Kegiatan Keuangan, serta jumlah SDM yang kurang sehingga penyelesaian tugas kurang maksimal

Adapun upaya untuk perbaikan kinerja tahun 2024, yaitu :

- 1) Menindaklanjuti semua rekomendasi dari APIP terkait SAKIP
- 2) Meningkatkan nilai uang per GU dari tahun 2023 agar tidak terlalu banyak melakukan usulan GU.

h. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.51
Tabel Target dan Realisasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Orang	2 Orang	66,67%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	97,95%
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	94,16%
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100%
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48 Laporan	100%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	9 Unit	76,26%
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	17 Unit	68%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	13 Unit	100%

Sub Bagian Umum & Kepegawaian untuk mencapai target dijalankan oleh 1 orang Kasubbag Umum dan Kepegawaian dibantu 1 orang JFU dan 2 orang PTT dengan anggaran sebesar Rp 2.079.481.919 yang terealisasi sebesar Rp 1.899.619.970 (91,35%). Ada 19 Kinerja Utama Kasubbag Umum & Kepegawaian dari 16 Kinerja Utama yang Capaiannya di atas 90%.

Upaya yang sudah dilakukan selama tahun 2023, yaitu :

- 1) Pasang baru Kwh listrik untuk Bidang Pengelolaan Pajak Daerah agar server tetap bisa menyala
- 2) Pemeliharaan Instalasi Listrik
- 3) Pembelian Mebel dan Dispenser untuk mendukung Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah dalam menerima wajib pajak daerah yang ingin melakukan pembayaran di kantor.

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun 2023, yaitu :

- 1) Listrik yang sering padam dikarenakan instalasi listrik yang sudah berumur
- 2) Tidak ditemukannya pelatihan pegawai yang kredibel
- 3) Pemeliharaan 4 buah roda dua yang tidak terealisasi karena tidak mendesak pada tahun 2023
- 4) Pemeliharaan PC, UPS, dan Printer yang tidak terealisasi karena tidak mendesak pada tahun 2023

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja tahun 2024, yaitu:

- 1) Melakukan tambahan daya listrik untuk menunjang kegiatan di kantor
- 2) Melakukan pembelian sarana dan prasarana

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2023 melampaui target APBD-P sebesar 126,80%. Secara persentase, Pendapatan Transfer paling besar dengan persentase 131,63%. Sedangkan Belanja Operasi terealisasi 83,96% dan Belanja Modal sebesar 97,10% atau dengan rata-rata 84,56%. Adapun anggaran dan realisasi APBD-P Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 dapat dilihat pada ringkasan tabel berikut, yaitu :

Tabel 3.52
Tabel Anggaran dan Realisasi APBD 2023

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	Persentase
Pendapatan			
Total Pendapatan Daerah	1.739.292.358.915	2.205.493.594.173,45	126,80
Pendapatan Asli Daerah	215.796.462.766	201.345.307.158,18	93,30
Pendapatan Transfer	1.522.295.931.980	2.003.859.813.167,27	131,63
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.199.964.169	288.473.848,00	24,04
Belanja			
Belanja Operasi	12.614.743.044	10.591.942.950,00	83,96
Belanja Modal	594.659.326	577.434.825,00	97,10

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Tabel 3.53
Tabel Anggaran Realisasi menurut Sasaran dan Program

Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		13.209.402.370	11.169.377.775	84,56
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	11.016.614.374	9.462.643.750	85,89

Sasaran Strategis	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.192.787.996	1.706.734.025	77,83

Tabel 3.54
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	84,56%	135,03%	50,47%

Efisiensi berada pada angka 50,47%. Hal ini dikarenakan Capaian ke-3 IKU Badan Pendapatan Daerah di atas 100%. Realisasi Kinerja sebesar 135,03% diperoleh dari rata-rata ke-3 IKU. Untuk tahun 2024, Sasaran Strategis Badan Pendapatan Daerah hanya mengambil 1 indikator, yakni Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian Fiskal).

Anggaran yang tidak terealisasi paling besar secara keuangan ada pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Terdapat sisa Rp 1.369.740.200. Hal ini dikarenakan capaian insentif retribusi dari SKPD pemungut yang rendah.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022-2023

Tabel 3.55
Tabel Anggaran Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2021-2022

No	Program / Kegiatan 2022	No	Program / Kegiatan 2023
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut yang sudah terelisasi pada Tahun 2023 secara ringkas, yaitu :

1. Persentase IKU Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 15,27%, di atas target 8,00%, atau dengan capaian 191,00%
2. Persentase IKU Pertumbuhan PAD berhasil sebesar 3,85%, di atas target 3,50%, atau dengan capaian 110,00%
3. Persentase IKU PAD terhadap Pendapatan Daerah (Tingkat Kemandirian Fiskal) sebesar 8,77%, di atas target 9,13%, atau dengan capaian 104,10%
4. Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid sebesar 6,43%, lebih baik dari target 6,5%, atau dengan capaian 101,04%
5. Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah sebesar 100%, sesuai dengan target 100%, atau dengan capaian 100%
6. Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah sebesar 100%, sesuai dengan target 100%, atau dengan capaian 100%
7. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebesar 104,86%, lebih baik dari target 100%, atau dengan capaian 104,86%
8. Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) sebesar 107,56%, lebih baik dari target 100%, atau dengan capaian 107,56%
9. Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2 sebesar 2%, dibawah target 6,00%, atau dengan capaian 299,87%
10. Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah sebesar 2,04%, diatas target 1,85%, atau dengan capaian 110,37%
11. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah sebesar 2,01%, diatas target 1,90%, atau dengan capaian 105,97%
12. Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah sebesar 10,11%, diatas tagert 0,76%, atau dengan capaian 1330,26%
13. Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah sebesar 88,89 (A), diatas target 81 (B), atau dengan 105,90%
14. Nilai Hasil Evaluasi RB tidak terealisasi karena tidak dilakukan penilaian pada tahun 2023

15. Nilai Hasil Evaluasi ZI sebesar 78,17 (BB), diatas target 78 (BB), atau dengan capaian 100,21%
16. Nilai Hasil Evaluasi SAKIP sebesar 79,25 (BB), diatas target 78 (BB), atau dengan capaian 101,60%
17. Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti sebesar 100% sesuai target 100%, atau dengan capaian 100%

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Strategi Peningkatan Kinerja yang akan dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut di tahun 2024, yaitu:

1. Berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Desa untuk melibatkan Ketua RT dalam menyampaikan SPPT PBB-P2 serta melakukan penagihan PBB-P2
2. Membuat metode pengawasan pembayaran PBB-P2 secara realtime melalui Aplikasi Smartgov
3. Melakukan pendekatan persuasif kepada Subjek PBB-P2, melalui kontak telepon maupun bertemu langsung.
4. Mengingatkan wajib pajak daerah untuk membayar kewajiban sebelum jatuh tempo
5. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak daerah
6. Melakukan identifikasi data piutang PBB-P2 melalui database PBB-P2
7. Menyampaikan informasi tunggakan PBB-P2 kepada Pemerintah Desa
8. Melakukan penagihan langsung kepada Subjek PBB-P2, khususnya Badan / Perusahaan.
9. Melakukan penagihan pajak daerah secara langsung ke wajib pajak daerah
10. Menghimbau pada wajib pajak yang dipasang alat perekam data transaksi pembayaran dengan cara melaksanakan sosialisasi agar lebih mematuhi ketentuan yang berlaku
11. Mensosialisasikan Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada SKPD (Kepala SKPD, Pengelola Pajak dan Retribusi Bendahara), serta masyarakat
12. Meningkatkan Koordinasi dengan Bank RKUD untuk menyukkseskan Transaksi Non Tunai
13. Memantau perkembangan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah
14. Menyusun Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
15. Menyusun Kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Mengarahkan SKPD agar dalam memperhitungkan target pendapatan dengan memperhitungkan realisasi tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA UTAMA (ESELON II)

Kabupaten : Tanah Laut

Nama SKPD : Badan Pendapatan Daerah

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintah bidang pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Fungsi : a. Penyusun kebijakan teknis bidang pendapatan
b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan
d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Penanggung Jawab / Sumber Data
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun berjalan (n) – Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1) Realisasi Pendapatan Pajak dan Retda tahun sebelumnya (n-1) x 100%
		2.	Persentase Pertumbuhan Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD tahun berjalan (n) – Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1) Realisasi PAD tahun sebelumnya (n-1) x 100%
		3.	Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (n) Realisasi Pendapatan Daerah tahun berjalan (n) x 100%
				Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Penjabat Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

SYAMSIR RAHMAN

Pihak Pertama,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	8,00%
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	3,50%
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	8,77%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.927.525.470,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.107.511.638,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 151.180.241,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 463.432.530,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 339.357.510,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.192.787.996,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023


Penjabat Bupati Tanah Laut,

SYAMSIR RAHMAN


Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

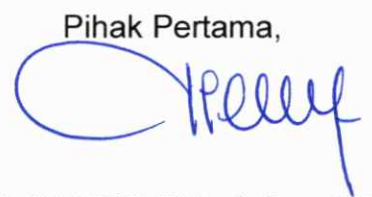
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 (B)
		Nilai Hasil Evaluasi RB	-
		Nilai Hasil Evaluasi ZI	78 (BB)
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)
		Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.927.525.470,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.107.511.638,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 151.180.241,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 463.432.530,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 339.357.510,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDIISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6,5%
2.	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%
3.	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.043.669.976,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 466.336.006,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 349.760.579,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 57.615.000,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 169.958.391,-


Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,0%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 967.090.294,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 839.135.121,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 127.955.173,-

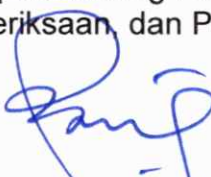
Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Pertama,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1,85%
2.	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1,90%
		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,76%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 182.027.726,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 69.995.418,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 12.710.000,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 99.322.308,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,


Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

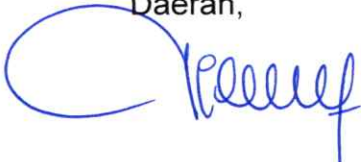
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2.	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.524.149,-
		▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.082.836,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.927.525.470,-
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.926.192.380,-
		▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.333.090,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWAHYUDOTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
6.	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen
8.	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket
9.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
10.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit
11.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit
12.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
14.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
17.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit
19.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit

PROGRAM DAN KEGIATAN


No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 18.000.000,-
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 1.107.511.638,-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.627.025,-
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 135.929.022,-
		▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.919.493
		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 22.894.202

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.267.000
		▪ Penyediaan Bahan/Material	Rp 10.000.000
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 920.874.896
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 151.180.241,-
		▪ Pengadaan Mebel	Rp 90.740.253,-
		▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.439.988,-
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 463.432.530,-
		▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000
		▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 118.500.530
		▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.884.000
		▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 342.048.000
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 339.357.510,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 15.300.000
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 89.667.000
		▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.394.000

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 210.996.510

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYAWARMAN, SH, MH

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Pihak Pertama,

ADITYAWARMAN, SH, MH
NIP. 19851026 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 839.135.121 ,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 839.135.121 ,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZADIN NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak
Daerah,



ADITYAWARMAN, SH, MH
NIP. 19851026 201502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan
Evaluasi Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Pihak Pertama,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

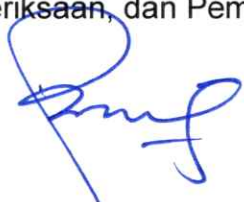
No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 127.955.173,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 127.955.173,-

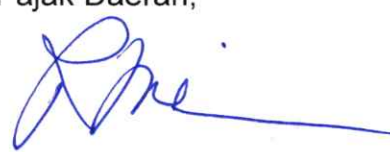
Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi
Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IZZUDDIN, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama,

M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 873.711.585,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 466.336.006,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 349.760.579,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 57.615.000,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah,



M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASMI NOORBANA, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama,


HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	8.000 Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 163.853.391,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 163.853.391,-

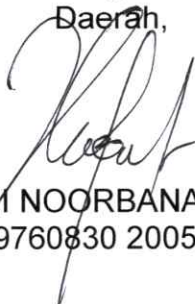
Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah,



HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABERIANSYAH, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 99.322.308,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 99.322.308,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah,



ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan
Perencanaan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pihak Kedua,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,

NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 82.705.418,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 69.995.418,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 12.710.000,-

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Kepala Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Retda dan Pelaporan,

Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan
Perencanaan Pendapatan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. SUKAMTA

Jabatan : Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Januari 2023

Pihak Kedua,

H. SUKAMTA

Pihak Pertama,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	8,00%
		Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6,20%
		Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	8,77%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.295.525.470,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 535.246.400,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 151.180.241,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 429.928.530,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 321.858.510,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 2.272.478.752,-



Bupati Tanah Laut,

H. SUKAMTA



Pelaihari, Januari 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

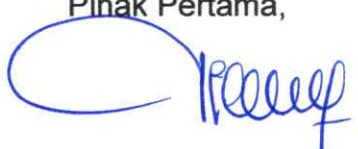
Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai indeks kepuasan pelayanan SKPD	B
		Nilai hasil evaluasi RB, ZI dan SAKIP	BB
		Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.295.525.470,-
		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 535.246.400,-
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 151.180.241,-
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 429.928.530,-
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 321.858.510,-


Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 06 Januari 2023
Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,


HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. Rudi Ismanto, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menurunnya data Pajak Daerah (PBBP2) yang tidak valid	Persentase penurunan data Pajak Daerah (PBBP2) yang tidak valid	4,00%
2.	Meningkatnya penerimaan Pajak Daerah (PBBP2 dan BPHTB)	Persentase peningkatan kontribusi penerimaan Pajak Daerah (PBBP2 dan BPHTB)	100%
3.	Menurunnya tunggakan Pajak Daerah (PBBP2)	Persentase berkurangnya tunggakan Pajak Daerah (PBBP2)	2,00%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 788.674.780,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 668.294.607,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 120.380.173,-

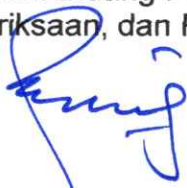
Kepala Badan Pendapatan Daerah,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%
2.	Meningkatnya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%
3.	Meningkatnya penerimaan pajak daerah	Persentase peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%

PROGRAM DAN KEGIATAN


No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.155.511.029,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 748.135.450,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 349.760.579,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 57.615.000,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 149.958.700,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,


Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Pertama,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Kedua

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	5,00%
2.	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	4,32%
		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	0,666%

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 178.334.243,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 79.999.375,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 23.335.000,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 74.999.868,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain,
Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007



Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IMPRON, SE

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

M. IMPRON, SE
NIP. 19770929 200701 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen
2.	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
3.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/Bulan
4.	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 9.606.985,-
		▪ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 4.524.149,-
		▪ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 5.082.836,-
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 8.295.525.470,-
		▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.294.192.380,-
		▪ Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 1.333.090,-

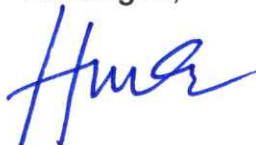
Pelaihari, 06 Januari 2023

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sosy MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISWAHYUDOTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT

Jabatan : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Pihak Pertama,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan
2.	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Orang
3.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	13 Jenis
4.	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	44 Jenis
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	2 Jenis
5.	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Jenis
6.	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak	11 Jenis
		Jumlah penggandaan	20.832 Lembar
7.	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Yang Dilaksanakan	1 Tahun
		Jumlah Rapat Yang Dilaksanakan	5 Kali
		Jumlah Tamu	200 Orang
9.	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket
		Jumlah unit mebel yang disediakan	6 Unit
10.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	3 Unit
11.	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
12.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan
13.	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Jenis
14.	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran Asuransi Kesehatan, JKK, dan JKM untuk 14 orang PTT	11 Laporan
		Jumlah bulan pembayaran honorarium 14 orang PTT	11 Laporan
15.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
16.	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara	8 Unit
		Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara	1 Unit
17.	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Yang Dipelihara	26 Unit
18.	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 18.000.000,-
		▪ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp 18.000.000,-
		2. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 535.246.400,-
		▪ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 4.627.025,-

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 99.663.784,-
		▪ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.919.493
		▪ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 22.894.202
		▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 3.267.000
		▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 394.874.896
		3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 151.180.241,-
		▪ Pengadaan Mebel	Rp 90.740.253,-
		▪ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 60.439.988,-
		4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 429.928.530,-
		▪ Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 1.000.000
		▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 113.500.530
		▪ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 1.884.000
		▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 313.544.000
		5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 321.858.510,-
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 15.300.000
		▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 87.168.000

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
		▪ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 23.394.000
		▪ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 195.996.510

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



HJ. IIN HERLINA, S.Sos, MT
NIP. 19661025 198602 2 002

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYAWARMAN, SH

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Pihak Pertama,

ADITYAWARMAN, SH
NIP. 19851026 201502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 668.294.607,-
		▪ Penagihan Pajak Daerah	Rp 668.294.607,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ AidIN NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak
Daerah,



ADITYAWARMAN, SH
NIP. 19851026 201502 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan
Evaluasi Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

MOHD RIZ Aidin Noor, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Pihak Pertama,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 120.380.173,-
		▪ Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 120.380.173,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



MOHD RIZ Aidin NOOR, S.Sos
NIP. 19760725 199503 1 001

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi
Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. IZZUDDIN, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama,

M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan
3.	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 1.155.511.029,-
		▪ Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 748.135.450,-
		▪ Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 349.760.579,-
		▪ Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp 57.615.000,-

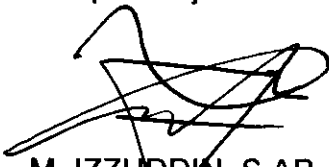
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah,



M. IZZUDDIN, S.AP
NIP. 19781010 200901 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASMI NOORBANA, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Pihak Pertama

HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	8.000 Layanan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 149.958.700,-
		▪ Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp 149.958.700,-

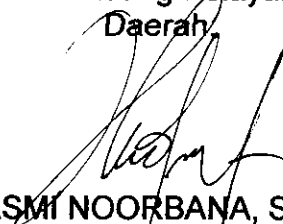
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah,



H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19701013 199403 1 005

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah,



HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABERIANSYAH, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2 Laporan

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 74.999.868,-
		▪ Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 74.999.868,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah,



ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,

NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen
2.	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 103.334.375,-
		▪ Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 79.999.375,-
		▪ Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp 23.335.000,-

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Retda dan Pelaporan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-
Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan
Perencanaan Pendapatan,



NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL RAHIM NOOR, S.Sos

Jabatan : Pranata Komputer Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 19 Januari 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001

Pihak Pertama,

ABDUL RAHIM NOOR, S.Sos
NIP. 19750816 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Menyusun perencanaan transisi layanan teknologi informasi	Jumlah dokumen perencanaan transisi layanan teknologi informasi	1 Dokumen
2	Mengelola perubahan layanan teknologi informasi	Jumlah dokumen perubahan layanan teknologi informasi	5 Dokumen
3	Melakukan sosialisasi tentang pengelolaan data	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan data	1 Laporan
4	Melakukan analisis kebutuhan informasi	Jumlah dokumen hasil analisis kebutuhan informasi	1 Dokumen
5	Melakukan evaluasi pengelolaan data	Jumlah dokumen hasil evaluasi pengolahan data	1 Dokumen
6	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pranata Komputer	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	12 Laporan

Pelaihari, 19 Januari 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah,

Pranata Komputer Muda,


Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19680916 199010 1 001


ABDUL RAHIM NOOR, S.Sos
NIP. 19750816 200803 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. FAHRUJI, SE, Ak. MM

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,


H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,


H. FAHRUJI, SE, Ak. MM
NIP. 19651130 198903 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	156 Laporan
2	Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan pengolahan dan analisis data terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	156 Laporan
3	Memberikan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan rekomendasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	63 Laporan
4	Melakukan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165 Laporan
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB PENDATAAN PENDAFTARAN DAN KEBERATAN PAJAK DAERAH		
1	Memeriksa konsep daftar wajib pajak daerah	Jumlah kegiatan	12 Kegiatan
2	Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan pendataan / pemantauan lapangan	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan
3	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pendataan dan atau peninjauan lapangan subjek / objek pajak daerah	Jumlah kegiatan	6 Kegiatan
4	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah kegiatan	4 Kegiatan
5	Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka menangani dan menyelesaikan keberatan yang diajukan wajib pajak	Jumlah kegiatan	12 Kegiatan
6	Melaporkan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan langsung	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	120 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,

H. MUHAMMAD HAYAT, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Analisis Keuangan Pusat dan
Daerah Muda,

H. FAHRUJI, SE, Ak. MM
NIP. 19651130 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRLIN PURNAMAWATI, A.Md

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain Retda dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Pihak Pertama,

IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP. 19770409 199703 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
A	KINERJA UTAMA		
1	Melakukan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa	Jumlah laporan identifikasi dan inventarisasi data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa	4 Laporan
2	Melakukan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;	Jumlah laporan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa;	4 Laporan
3	Menyajikan informasi keuangan daerah	Jumlah laporan penyajian informasi keuangan daerah	4 Laporan
4	Mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional)	Jumlah laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat internal (institusional)	4 Laporan
5	Mengumpulkan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/wilayah/daerah, nasional, dan Internasional);	Jumlah laporan pengumpulan (mengenali dan mencari) informasi keuangan daerah yang bersifat eksternal (regional/ wilayah/ daerah, nasional, dan internasional);	4 Laporan
6	Mengidentifikasi informasi keuangan daerah	laporan identifikasi informasi keuangan daerah	4 Laporan
B	KINERJA TAMBAHAN PENANGGUNG JAWAB PEMBUKUAN DAN PELAPORAN		
1	Melaksanakan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan provinsi	Jumlah kegiatan	24 Kegiatan
2	Mengumpulkan, menghimpun, menganalisis dan menyajikan data Pendapatan Daerah dan Pusat	Jumlah data	400 Data
3	Mengumpulkan, menghimpun, melaksanakan identifikasi dan analisis realisasi penerimaan pendapatan DBH Pusat	Jumlah laporan	18 Laporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
4	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bidang Pelaporan	Jumlah kegiatan	360 Kegiatan
5	Melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembukuan dan pelaporan berdasarkan peraturan yang berlaku	Jumlah dokumen	4 Dokumen
6	Mengumpulkan, menghimpun, melaksanakan identifikasi dan analisis realisasi penerimaan pendapatan DBH Provinsi	Jumlah laporan	18 Laporan
7	Melaporkan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan langsung	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	120 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Bidang Penagihan,
Pemeriksaan, dan Pembukuan,



Hj. ISNA SAFRIANI, S.Sos
NIP. 19730329 199403 2 007

Analisis Keuangan Pusat dan
Daerah Muda,



IRLIN PURNAMAWATI, A.Md
NIP. 19770409 199703 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAFIZ ANSYARI, S.Ak.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

Pihak Pertama,

HAFIZ ANSYARI, S.Ak.
NIP. 19940207 202203 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima dan memeriksa bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen bahan data Program Anggaran dan Pelaporan yang diterima dan diperiksa	35 Dokumen
2.	Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan	Jumlah dokumen hasil pengklasifikasian bahan dan data Program Anggaran dan Pelaporan	35 Dokumen
3.	Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur dalam rangka penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen hasil kajian karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan Program Anggaran dan Pelaporan	35 Dokumen
4.	Menyusun konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan	Jumlah dokumen konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	7 Dokumen
5.	Mendiskusikan konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah kegiatan diskusi konsep penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan dengan pejabat yang berwenang	35 Kegiatan
6.	Menyusun kembali Program Anggaran dan Pelaporan berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah dokumen Program Anggaran dan Pelaporan hasil perbaikan dari diskusi	7 Dokumen
7.	Mengevaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran	Jumlah laporan hasil evaluasi proses penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	9 Laporan
8.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilaporkan	2 Laporan

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
9.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	50 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021



HAFIZ ANSYARI, S.Ak.
NIP. 19940207 202203 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAMILAH, S.Kom

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

Pihak Pertama,

KAMILAH, S.Kom
NIP. 19821008 201001 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian	Jumlah dokumen hasil sortir bukti pengeluaran dan penerimaan serta buku kas sesuai mata anggaran	450 Dokumen
2.	Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya	Jumlah dokumen hasil pencocokkan bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan	450 Dokumen
3.	Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Jumlah laporan pemeriksaan terhadap alat bukti	50 Laporan
4.	Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan	Jumlah laporan hasil temuan pemeriksaan yang dilaporkan	1 Laporan
5.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain	100 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

Verifikator Keuangan,



KAMILAH, S.Kom
NIP. 19821008 201001 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRI REJEKI, A.Md.Pjk

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : M. IMPRON, SE, MM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

Pihak Pertama,

SRI REJEKI, A.Md.Pjk
NIP. 19800403 200701 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah dokumen pengelolaan uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan	500 Dokumen
2.	Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar uang SPM Giro yang diurus	160 Dokumen
3.	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah pembayaran atas tagihan yang dilaksanakan	500 Dokumen
4.	Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah permintaan uang muka yang dilayani	1 Dokumen
5.	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah formulir daftar penerimaan dan pengeluaran uang yang disusun	180 Dokumen
6.	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan yang dibuat	19 Laporan
7.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	2 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan,



M. IMPRON, SE, MM
NIP. 19770929 200701 1 021

Bendahara,



SRI REJEKI, A.Md.Pjk
NIP. 19800403 200701 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Kode Pos 70814

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYARINA, A.Md

Jabatan : Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ISWAHYUDOTO, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

Pihak Pertama,

MAYARINA, A.Md
NIP. 19700314 200701 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan sarana dan prasarana kantor	2 Dokumen
2.	Memantau Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai dengan bidang tugasnya	24 Kegiatan
3.	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pengendalian program	5 Dokumen
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah pelaksanaan program yang dikoordinasikan	20 Program
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	20 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	75 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian,

ISWAHYUDOTO, S.Kom
NIP. 19760827 200501 1 013

Pengelola Sarana dan Prasarana
Kantor,

MAYARINA, A.Md
NIP. 19700314 200701 2 015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENI ANGRAINI, S.Ak.

Jabatan : Analis Pajak dan Retribusi Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

Pihak Pertama,

RENI ANGRAINI, S.Ak.
NIP. 19840613 201001 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah dokumen bahan kerja yang dikumpulkan	300 Dokumen
2.	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Pajak dan Retribusi Daerah dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah dokumen hasil analisa	120 Dokumen
3.	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian berdasarkan permasalahan Pajak dan Retribusi Daerah	120 Laporan
4.	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja	12 Laporan
5.	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen saran yang disampaikan kepada pimpinan unit	24 Dokumen
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	60 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, Dan
Evaluasi Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

Analisis Pajak dan Retribusi
Daerah,



RENI ANGRAINI, S.Ak.
NIP. 19840613 201001 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDUL WAHID, SH

Jabatan : Pengelola Data Transaksi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 02 Februari 2023

Pihak Kedua,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

Pihak Pertama,

ABDUL WAHID, SH
NIP. 19770221 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program kerja, bahan dan alat pengelolaan Data transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;	Jumlah dokumen program kerja yang disusun	75 Dokumen
2.	Memantau pengelolaan Data transaksi, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;	Jumlah kegiatan pemantauan pengelolaan data transaksi agar sesuai dengan rencana awal	90 Kali
3.	Mengendalikan pengelolaan Data transaksi, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;	Jumlah kegiatan pengendalian pengelolaan data transaksi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku	80 Kali
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah kegiatan koordinasi dengan unit terkait atau instansi lain	90 Kali
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;	Jumlah laporan yang dievaluasi dan disusun secara berkala	70 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.	Jumlah laporan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan	90 Laporan

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, Dan
Evaluasi Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP. 19770718 200901 1 001

Pelaihari, 02 Februari 2023
Pengelola Data Transaksi,



ABDUL WAHID, SH
NIP. 19770221 201001 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDY WIJAYANTO, S.Kom

Jabatan : Pengelola Penagihan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADITYAWARMAN, SH

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


ADITYAWARMAN, SH
NIP. 19851026 201502 1 001


RUDY WIJAYANTO, S.Kom
NIP. 19880804 201502 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program kerja, bahan dan alat pengelolaan penagihan dan pengawasan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah Dokumen Program Kerja yang Disusun	10 Dokumen
2.	Memantau pengelolaan penagihan dan pengawasan, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah Kegiatan Pemantauan Pengelolaan Penagihan dan Pengawasan sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan yang Berlaku	120 Kali
3.	Mengendalikan pengelolaan penagihan dan pengawasan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah Kegiatan Pengendalian Pengelolaan Penagihan Dan Pengawasan Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Yang Berlaku	12 Kali
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dengan Unit Terkait Atau Instansi Lain	5 Kali
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah Laporan yang Dievaluasi dan Disusun secara Berkala	11 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan Tugas Kedinasan Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan	25 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Penagihan
Pajak Daerah,

Pengelola Penagihan dan
Pengawasan,


ADITYAWARMAN, SH
NIP. 19851026 201502 1 001


RUDY WIJAYANTO, S.Kom
NIP. 19880804 201502 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHWAN YANURI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RIJA NUPARI, S.ST

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

Pihak Pertama,

AKHWAN YANURI
NIP 19790809 200901 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	100 Dokumen
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	70 Dokumen
3.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	50 Dokumen
4.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	100 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	230 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	360 Laporan

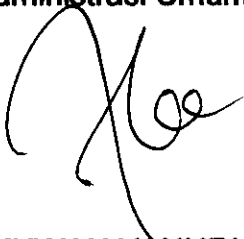
Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan,
Monitoring, Pembukuan, dan
Evaluasi Pajak Daerah,



RIJA NUPARI, S.ST
NIP 19770718 200901 1 001

Pengadministrasi Umum,



AKHWAN YANURI
NIP 19790809 200901 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHALLI

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : HASMI NOORBANA, S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

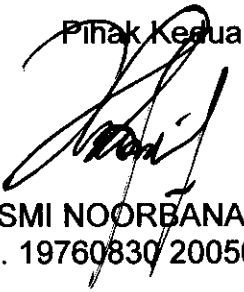
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

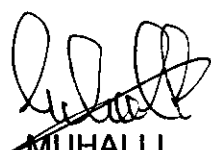
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,


HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010

Pihak Pertama,


MUHALLI
NIP. 19651114 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi umum yang disortir	125 Dokumen
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi umum yang diberi lembar pengantar	115 Dokumen
3.	Mengelompokkan administrasi umum atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi umum yang dikelompokkan	120 Dokumen
4.	Mendokumentasikan administrasi umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi umum yang didokumentasikan	112 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	118 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	122 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Pelayanan
Pajak Daerah

HASMI NOORBANA, S.Kom
NIP. 19760830 200501 1 010

Pengadministrasi Umum,

MUHALLI
NIP. 19651114 200901 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DEWI HARTATI, A.Md

Jabatan : Pengelola Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006

DEWI HARTATI, A.Md
NIP. 19800612 201101 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan Pendapatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik	Jumlah dokumen program kerja, bahan dan alat perlengkapan pengelolaan pendapatan	12 Dokumen
2.	Memantau Pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal	Jumlah kegiatan pemantauan pengelolaan pendapatan	12 Kali
3.	Mengendalikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan	Jumlah dokumen hasil pengendalian program kerja	12 Dokumen
4.	Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal	Jumlah kegiatan yang dikoordinasikan	12 Kali
5.	Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya	Jumlah laporan berkala yang disusun	12 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	12 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Pendapatan
Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan,
dan Perencanaan Pendapatan,

Pengelola Pendapatan,



NOVIAN ISKANDAR Z., S.Kom
NIP. 19771113 201001 1 006



DEWI HARTATI, A.Md
NIP. 19800612 201101 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD JAZULI

Jabatan : Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ABERIANSYAH, S.AP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 06 Januari 2023

Pihak Kedua,

ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002

Pihak Pertama,

MUHAMMAD JAZULI
NIP. 19760614 200801 1 021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1.	Menerima, mencatat dan menyortir administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang disortir	111 Dokumen
2.	Memberi lembar pengantar pada administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang diberi lembar pengantar	101 Dokumen
3.	Mengelompokkan administrasi Data Penyajian dan Publikasi atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang dikelompokkan	386 Dokumen
4.	Mendokumentasikan administrasi Data Penyajian dan Publikasi sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi	Jumlah administrasi Data Penyajian dan Publikasi yang didokumentasikan	365 Dokumen
5.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas	12 Laporan
6.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan kegiatan tugas kedinasan lain	20 Laporan

Pelaihari, 06 Januari 2023

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah,



ABERIANSYAH, S.AP
NIP. 19660911 199803 1 002

Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi,



MUHAMMAD JAZULI
NIP. 19760614 200801 1 021

Capaian Kinerja Per Triwulan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	1.	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	8,00%	15,28%	15,61%	11,28%	15,28%	191,00%
	2.	Persentase Pertumbuhan PAD	3,50%	-21,76%	-18,33%	-2,75%	3,85%	110,00%
	3.	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8,77%	10,40%	8,93%	9,24%	9,13%	104,10%

Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontrbusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	-	29,16%	63,73%	104,86%	104,86%
2.	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%	-	50,85%	79,60%	107,56%	107,56%
3.	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,0%	-	3,47%	4,46%	6,00%	299,87%

Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	1.	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%

Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, dan Evaluasi Pajak Daerah

Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I		TW III	TW IV	
Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1.	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	100%

Kepala Pengelolaan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6,5%	0,29%	1,49%	1,49%	6,43%	162,71%
Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%

Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1.	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	-	-	-	1	100%
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1.	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, Dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	-	-	-	1	100%
Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	1.	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	-	-	-	4	100%

Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.	Jumlah Layanan Dan Konsultasi Pajak Daerah	8.000 Layanan	2.926	6.997	7.200	8.000	100%

Kepala Bidang Pendapatan Lain-lain, Retda, dan Pelaporan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1,85%	20,10 %	47,52 %	36,54%	2,04%	110,37%
Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1.	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1,90%	19,31 %	47,81 %	36,76%	2,01%	105,97%
	2.	Persentase pertumbuhan penerimaan dari retribusi daerah	0,76%	20,34 %	11,75 %	8,71%	10,11%	1330,26%

Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah	2 Laporan	-	-	-	2 Laporan	100%

Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi 2023				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1.	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	-	-	-	2 Dokumen	100%
Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1.	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	-	-	4 Dokumen	6 Dokumen	100%

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah

Kinerja Utama	Indikator Kinerja		Target	Realisasi				Capaian
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	1.	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 (B)	83,33% (A)	84,72 (A)	84,72 (A)	88,89 (A)	104,59%
	2.	Nilai Hasil Evaluasi RB	-	-	-	-	-	-
	3.	Nilai Hasil Evaluasi ZI	78 (BB)	-	-	78,17 (BB)	78,17 (BB)	100,21%
	4.	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)	-	-	79,25 (BB)	79,25 (BB)	101,60%
	5.	Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	-	-	-	100%	100%

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	7 Dokumen	100%
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	100%
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	1 Dokumen	8 Dokumen	13 Dokumen	18 Dokumen	100%

Kepala Sub Bagian Umum Kepegawian

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	100%
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	3 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	66,66%
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	100%
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	-	-	-	4 Paket	97,95%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	-	-	-	2 Paket	100%
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	94,16%
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	6 Dokumen	12 Dokumen	18 Dokumen	24 Dokumen	100%
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	1 Paket	-	-	-	1 Paket	100%
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	-	-	-	8 Unit	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	5 Unit	1 Unit	2 Unit	5 Unit	5 Unit	100%
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	12 Laporan	24 Laporan	36 Laporan	48 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	100%
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%

Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Capaian
			I	II	III	IV	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	5 Unit	6 Unit	8 Unit	9 Unit	76,28
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	2 Unit	6 Unit	8 Unit	17 Unit	68%
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	5 Unit	6 Unit	6 Unit	13 Unit	100%

Pelaihari, 19 Januari 2024

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19680916 199010 1 001

CASCADING KINERJA 2018-2023
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

TUJUAN RPJMD	TUJUAN RKPD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi
	INDIKATOR : Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD	SASARAN RKPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik
	INDIKATOR 1 : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah INDIKATOR 2 : Pertumbuhan PAD INDIKATOR 3 : Persentase pelanggaran wajib pajak daerah INDIKATOR 4 : Pertumbuhan penerimaan pajak daerah INDIKATOR 5 : Cakupan ketersediaan sistem informasi pajak daerah INDIKATOR 6 : Ketersediaan data wajib pajak dan potensi penerimaan pajak daerah INDIKATOR 7 : Pertumbuhan penerimaan PBB dan BPHTB INDIKATOR 8 : Pertumbuhan penerimaan retribusi daerah INDIKATOR 9 : Cakupan ketersediaan sistem informasi retribusi daerah INDIKATOR 10 : Ketersediaan data potensi penerimaan retribusi daerah INDIKATOR 11 : Jumlah inovasi pelayanan di Badan Pendapatan Daerah
TUJUAN OPD	TUJUAN OPD 1 : Meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
	INDIKATOR 1 : Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat INDIKATOR 2 : Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat INDIKATOR 3 : Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat
	TUJUAN OPD 2 : Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah
	INDIKATOR 1 : Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat INDIKATOR 2 : Persentase penerimaan pajak daerah meningkat INDIKATOR 3 : Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat
	TUJUAN OPD 3 : Terwujudnya tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien
	INDIKATOR : Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai

SASARAN OPD	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
	INDIKATOR 1 : Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah INDIKATOR 2 : Persentase pertumbuhan PAD INDIKATOR 3 : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

PROGRAM	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
SASARAN PROGRAM	<p>Sasaran 9 : Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah</p> <p>INDIKATOR 9 : Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah INDIKATOR 9 : Nilai Hasil Evaluasi RB INDIKATOR 9 : Nilai Hasil Evaluasi ZI INDIKATOR 9 : Nilai Hasil Evaluasi SAKIP</p>	<p>SASARAN 1 : Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid SASARAN 2 : Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah SASARAN 3 : Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah SASARAN 4 : Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB SASARAN 5 : Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB P2 dan BPHTB) SASARAN 6 : Menurunnya tunggakan PBB-P2 SASARAN 7 : Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah SASARAN 8 : Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah</p> <p>INDIKATOR 1 : Persentase Peningkatan Pajak Daerah INDIKATOR 2 : Persentase Peningkatan Retribusi Daerah INDIKATOR 3 : Pesentase peningkatan hasil kekayaan yang dipisahkan INDIKATOR 4 : Pesentase peningkatan lain-lain pendapatan asli daerah yang Sah INDIKATOR 5 : Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB) INDIKATOR 6 : Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2 INDIKATOR 7 : Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah INDIKATOR 8 : Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah INDIKATOR 8 : Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah</p>

KEGIATAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pengelolaan Pendapatan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Tercapainya target sub kegiatan dari Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya target sub kegiatan dari Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya target sub kegiatan dari Pengelolaan Pendapatan Daerah
	INDIKATOR : Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	INDIKATOR : Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	INDIKATOR : Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
KEGIATAN	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
SASARAN KEGIATAN	Tercapainya target sub kegiatan dari Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya target sub kegiatan dari Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	INDIKATOR : Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	INDIKATOR : Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

KEGIATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
SASARAN KEGIATAN	Tercapainya target sub kegiatan dari Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tercapainya target sub kegiatan dari Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	INDIKATOR : Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	INDIKATOR : Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
KEGIATAN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SASARAN KEGIATAN	Tercapainya target sub kegiatan dari Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	INDIKATOR : Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
SUB KEGIATAN	SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	
OUTPUT	SESUAI KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021	

POHON KINERJA BAPENDA TANAH LAUT TAHUN 2023

KEPALA BADAN

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
3. Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah

SEKRETARIS

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

INDIKATOR KINERJA :

1. Nilai Indeks kepuasan pelayanan SKPD
2. Nilai hasil evaluasi RB
3. Nilai hasil evaluasi ZI
4. Nilai hasil evaluasi SAKIP
5. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

KEPALA BIDANG PENAGIHAN, Pemeriksaan, dan Pembukuan

KINERJA UTAMA :

1. Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
2. Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)
3. Menurunnya tunggakan PBB-P2

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
2. Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)
3. Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

KINERJA UTAMA :

1. Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid
2. Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah
3. Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid
2. Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah
3. Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah

KEPALA BIDANG PENDAPATAN LAIN LAIN, RETRIBUSI DAERAH DAN PELAPORAN

KINERJA UTAMA :

1. Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah
2. Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah

INDIKATOR KINERJA :

1. Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah
2. a. Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
b. Persentase pertumbuhan Penerimaan pendapatan dari retribusi daerah

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KINERJA UTAMA :

1. Tereaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
6. Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
7. Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8. Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Tersedianya Mebel
10. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
13. Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14. Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
15. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
16. Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17. Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18. Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

INDIKATOR KINERJA :

1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
3. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
4. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
6. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
7. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
8. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
10. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
11. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
14. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
15. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
16. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
17. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
18. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

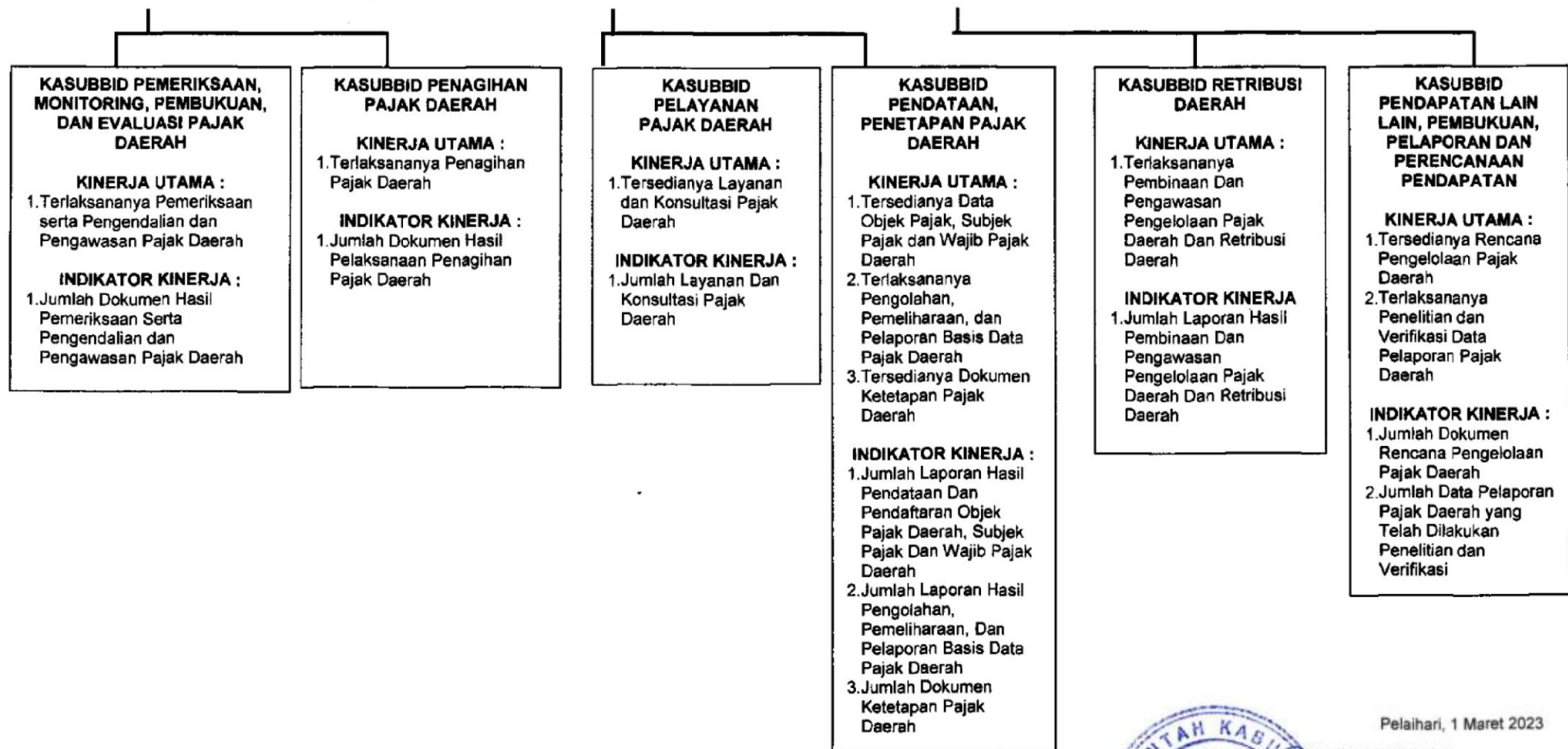
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN

KINERJA UTAMA :

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
4. Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
4. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD



Pelaihari, 1 Maret 2023

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Laut,



Drs. H. RUDI ISMANTO, M.Si
NIP. 19640916 199010 1 001

MATRIKS KESELARASAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

Renstra 2018 -2023					Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi			Persentase penerimaan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase					Kabupaten Tanah Laut
			Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah meningkat	Persentase					
			Persentase PAD terhadap pendapatan daerah meningkat	Persentase					
Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah, serta pendapatan lainnya yang sah			Persentase penerimaan PBB P2 dan BPHTB meningkat	Persentase					
			Persentase penerimaan pajak daerah meningkat	Persentase					
			Persentase penerimaan pendapatan lain lain dan retribusi daerah meningkat	Persentase					
	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-		Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase	Meningkatnya pendapatan asli daerah dengan menggali sumber-	Persentase pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah	6,50%	13.209.402.370	Kepala Badan Pendapatan Daerah
	sumber pendapatan daerah secara		Persentase pertumbuhan PAD	Persentase	sumber pendapatan daerah secara	Persentase pertumbuhan PAD	-7,25%		
	optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi		Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persentase	optimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	8,00%		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase	Menurunnya data PBB-P2 yang tidak valid	Persentase penurunan data PBB-P2 yang tidak valid	6,5%	1.043.669.976	Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah
			Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase	Terealisasinya potensi objek pajak yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	Persentase potensi yang dapat dijadikan pendapatan pajak daerah	100%		

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase	Terealisasinya perhitungan dan penetapan pajak daerah	Persentase perhitungan dan penetapan pajak daerah	100%		
			Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase	Terealisasinya kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	Persentase kontribusi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB	100%	967.090.294	Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan
			Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	Persentase	Terealisasinya kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB-P2 dan BPHTB)	Persentase kontribusi penerimaan pajak daerah (non PBB dan BPHTB)	100%		
			Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	Persentase	Menurunnya tunggakan PBB-P2	Persentase berkurangnya tunggakan PBB-P2	2,00%		
			Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase	Meningkatnya pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	1,85%	182.027.726	Kepala Bidang Pendapatan Lain-Lain, Retda dan Pelaporan
			Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	Persentase	Meningkatnya potensi pendapatan lain-lain dan retribusi daerah	Persentase pertumbuhan penerimaan lain-lain pendapatan daerah	1,90%		
			Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	Persentase		Persentase pertumbuhan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah	-7,00%		
			Total					2.192.787.996	
		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pemenuhan Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase			100%	2.192.787.996	
		Sub Kegiatan Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	69.995.418	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Dokumen	466.336.006	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	349.760.579	
		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen	57.615.000	
		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	8000 Layanan	169.958.391	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	6 Dokumen	12.710.000	Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain, Pembukuan, Pelaporan, dan Perencanaan Pendapatan
		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	839.135.121	Kepala Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	1 Dokumen	127.955.173	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan, Monitoring, Pembukuan, Dan Evaluasi Pajak Daerah
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Laporan	99.322.308	Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mewujudkan tata kelola SKPD yang tertib, efektif dan efisien			Persentase tata kelola kesekretariatan, umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan kinerja SKPD yang memadai	Persentase					
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	Nilai	Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Sekretariat Badan Pendapatan Daerah	81 (B)	11.016.614.374	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
			Nilai Hasil Evaluasi RB	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi RB	-		
			Nilai Hasil Evaluasi ZI	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi ZI	78 (BB)		
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	78 (BB)		
			Persentase temuan BPK / Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persentase		Persentase Temuan BPK / Inspektorat yang Ditindaklanjuti	100%		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase			100%	9.606.985	
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.524.149	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	Terlaksanya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.082.836	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Sub Bagian
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase			100%	8.927.525.470	
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	29 Orang/bulan	8.926.192.380	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	18 Dokumen	1.333.090	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase			100%	18.000.000	
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		3 Orang	18.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase			100%	1.107.511.638	
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.627.025	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	135.929.022	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.919.493	
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.894.202	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.267.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Renja Perubahan 2023 / Perjanjian Kinerja 2023				
					Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target	Anggaran	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	920.874.896	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase			100%	151.180.241	
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	90.740.253	
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	60.439.988	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase			100%	463.432.530	
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.000.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	118.500.530	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.884.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	342.048.000	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

[illegible]